



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

(LPPPTK KPTK) GOWA SULAWESI SELATAN

LAPORAN

AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)

TAHUN ANGGARAN

2016



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya LPPPTK KPTK telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala LPPPTK KPTK, atas pelaksanaan tugas dan fungsinya menopang tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan program guru dan tenaga kependidikan yang dijabarkan menjadi kegiatan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang diperkuat dengan Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK).

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja LPPPTK KPTK, sampai dengan akhir tahun 2016, yang meliputi kinerja atas 5 sub kegiatan terkait program-program pengembangan SDM pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan: 1) Pendidik yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi (KPTK), 2) Guru dikdas mapel tematik yang ditingkatkan kompetensinya, 3) Kepala sekolah yang ditingkatkan kompetensinya, 4) 4) Pengawas yang ditingkatkan kompetensinya, 5) Peningkatan kualitas tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan peningkatan kompetensi PTK sesuai bidang tugasnya.

Kelima kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari 3 tujuan strategis LPPPTK KPTK yang telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan guna merealisasikan sasaran peningkatan kompetensi dan profesionalisme sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja LPPPTK KPTK Tahun 2016, serta Rencana Strategis LPPPTK KPTK tahun 2015- 2019. Untuk masing-masing kegiatan telah ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*), sehingga evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi jelas, terukur, dan akuntabel.

Target hasil secara umum dari program LPPPTK KPTK tahun anggaran 2016 berhasil dicapai dengan baik, bahkan untuk beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) target dapat tercapai secara signifikan. Upaya pelaksanaan program peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan bidang KPTK, Guru Dikdas, Kepala Sekolah, dan Pengawas

Sekolah yang akan terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidang keahliannya.

Sejalan dengan itu, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik juga telah menunjukkan kinerja yang cukup signifikan melalui implementasi penguatan sistem manajemen mutu dan prosedur perencanaan, koordinasi, pengelolaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kepegawaian, kerumahtanggaan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

LPPPTK KPTK menyadari bahwa tantangan pelaksanaan peningkatan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan masih cukup banyak dan memerlukan kerja keras pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, dukungan semua pihak dalam menjawab tantangan yang masih harus ditangani sebagaimana ditargetkan, yang pada saatnya akan dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja LPPPTK KPTK selama tahun 2016. Selain itu, laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada tahun mendatang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih.

Kepala LPPPTK KPTK Gowa,

Dr. H. A. Rusdi, M. Pd

NIP. 196504301991031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Ringkasan Eksekutif	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi.....	4
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA LPPPTK	
Bidang KPTK	10
A. Visi Misi LPPPTK Bidang KPTK	10
B. Tujuan Strategis LPPPTK Bidang KPTK.....	18
C. Sasaran Strategis LPPPTK Bidang KPTK	21
D. Program dan Kegiatan LPPPTK Bidang KPTK	23
E. Rencana Kinerja Tahunan.....	26
F. Perjanjian Kinerja	26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Analisis Capaian Sasaran	3
B. Akuntabilitas Keuangan	52
BAB IV. PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Misi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	12
Tabel 2.2.	Misi LPPPTK Bidang KPTK	14
Tabel 2.3.	Tujuan Strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	19
Tabel 2.4.	Tujuan Strategis LPPPTK Bidang KPTK	19
Tabel 2.5.	Sasaran strategis LPPPTK Bidang KPTK untuk mencapai Tujuan strategis TSL.1	21
Tabel 2.6.	Sasaran strategis LPPPTK Bidang KPTK untuk mencapai Tujuan strategis TSL.2	22
Tabel 2.7.	Sasaran strategis LPPPTK Bidang KPTK untuk mencapai Tujuan strategis TSL.3	20
Tabel 2.8.	DIPA LPPPTK KPTK Tahun Anggaran 2016, beserta perubahan-perubahannya selama tahun 2016	24
Tabel 2.9.	Rencana Kinerja Tahunan LPPPTK KPTK	27
Tabel 2.10.	Perjanjian Kinerja LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2016 (DIPA Awal), Target Capaian Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	28
Tabel 2.11.	Perjanjian Kinerja LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2016 (DIPA Revisi Terakhir), Target Capaian Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30
Tabel 3.1.	Pengukuran Kinerja LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2015	38
Tabel 3.2.	Perbandingan rencana dengan realisasi program dan anggaran program guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang KPTK Tahun 2015	39
Tabel 3.3.	Realisasi capaian Pelatihan IN Program Guru Pembelajar Bidang KPTK	40
Tabel 3.4.	Realisasi capaian pengembangan keprofesian berkelanjutan	41
Tabel 3.5.	Realisasi capaian model pemberdayaan sekolah dan pengembangan inovasi pembelajaran	42
Tabel 3.6.	Realisasi capaian workshop persiapan pelaksanaan PKB Guru Pembelajar	43

Tabel 3.7. Realisasi capaian pendidikan dan pelatihan instruktur nasional PKB guru pembelajar jenjang Dikdas	35
Tabel 3.8. Realisasi capaian PKB GP moda daring kombinasi	45
Tabel 3.9. Realisasi capaian kepala sekolah pembelajar	46
Tabel 3.10. Realisasi capaian program dukungan manajemen	48
Tabel 3.11. Komposisi anggaran berdasarkan unit kerja	53
Tabel 3.12. Serapan anggaran di setiap unit kerja sesuai alokasi dana masing-masing	55
Tabel 3.13. Serapan anggaran di setiap unit kerja terhadap total anggaran LPPPTK KPTK	57
Tabel 3.14. Komposisi anggaran berdasarkan jenis belanja	58
Tabel 3.15. Realisasi anggaran menurut jenis belanja terhadap alokasi dananya	59
Tabel 3.16. Realisasi anggaran menurut jenis belanja terhadap total anggaran	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi LPPPTK KPTK	9
Gambar 2.1. DIPA LPPPTK KPTK Tahun Anggaran 2016, beserta perubahan-perubahannya selama tahun 2016	24
Gambar 2.2. Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 (DIPA Awal) LPPPTK KPTK	30
Gambar 2.3. Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 (DIPA Revisi) LPPPTK KPTK	32
Gambar 3.1. Persentase komposisi anggaran berdasarkan unit kerja	55
Gambar 3.2. Serapan anggaran di setiap unit kerja sesuai alokasi dana masing-masing	56
Gambar 3.3. Serapan anggaran di setiap unit kerja terhadap total anggaran LPPPTK Bidang KPTK	57
Gambar 3.4. Persentase komposisi anggaran berdasarkan jenis belanja	58
Gambar 3.5. Realisasi anggaran menurut jenis belanja terhadap alokasi dananya	60
Gambar 3.6. Realisasi anggaran menurut jenis belanja terhadap total anggaran	61

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi (LPPPTK KPTK) Gowa sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan berbagai kegiatan Tahun 2016 sesuai dengan tugas dan fungsi yang meliputi kegiatan-kegiatan dan program peningkatan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) serta menyampaikan capaian kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) program yang mendukung hasil tersebut. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada program/kebijakan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran lembaga. Laporan ini menyatakan capaian kinerja lembaga sesuai dengan kebijakan dalam sasaran dan tujuan strategis dari rencana strategis LPPPTK KPTK Gowa.

LPPPTK KPTK didirikan berdasarkan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPPPTK Bidang KPTK. Permendikbud ini kemudian direvisi menjadi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPPPTK KPTK, dinyatakan: mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan dasar dan menengah di bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi.

Laporan ini menyatakan capaian kinerja lembaga sesuai dengan kebijakan utama dalam sasaran dan tujuan strategis dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari kegiatan pengembangan sumber daya manusia, penjaminan mutu pendidikan, pengembangan sarana dan prasarana, dan kegiatan rutin, yang meliputi berbagai kegiatan administrasi dan sifatnya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas LPPPTK KPTK.

Keluaran yang dialokasikan pemerintah dari APBN dan APBNP LPPPTK KPTK (hingga revisi keenam) pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp 103.129.484.000,- (Seratus tiga milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Namun sebagian anggaran tersebut diblokir dan tidak dapat dibelanjakan yaitu sebesar Rp 20.280.194.000 (Dua puluh

milyar dua ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), sehingga total anggaran yang digunakan LPPPTK KPTK selama tahun 2016 sebesar Rp 82.849.290.400 (Delapan puluh dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ratus rupiah). Total anggaran yang dapat dibelanjakan sampai akhir tahun 2016 adalah Rp 75.860.657.424 (Tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) atau 91.56%, dengan demikian sisa anggaran sebesar Rp 6.988.632.976 (Enam milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah). Sementara itu, capaian fisik program dan kegiatan LPPPTK KPKT tahun 2016 mencapai 91.50%.

Setiap tahun anggaran, instansi berwenang selalu melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga pemerintah. LPPPTK KPTK berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk LAKIP sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP disusun sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang kinerja instansi pemerintah dan kebermanfaatannya, antara lain:

- a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah (*good governance*) yang didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- b. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- c. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
- e. LAKIP juga digunakan sebagai bahan masukan bagi Kemdikbud dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Selanjutnya, selama kurun satu semester pelaksanaan program dan kegiatan, LPPPTK KPTK menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan tersebut mempengaruhi capaian target yang telah ditetapkan, sebagai berikut: adanya revisi-revisi dan blokir anggaran, sehingga memerlukan

penyesuaian atas jadwal pelaksanaan program kerja yang telah disusun sebelumnya, ketidakhadiran beberapa peserta Diklat serta adanya selisih dari harga perkiraan dengan realisasi (real cost) maupun selisih yang terkait biaya perjalanan dinas, sehingga capaian atas target penyerapan anggaran maupun fisik tidak sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan.

Gowa, 31 Desember 2016

BAB I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi yang kemudian disingkat menjadi LPPPTK KPTK merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang bermaksud untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Lembaga tersebut merupakan lembaga baru yang didirikan berdasarkan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPPPTK Bidang KPTK.

LPPPTK KPTK yang merupakan unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan acuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) LPPPTK KPTK Tahun 2015-2019. Renstra tersebut yang diturunkan dari Renstra GTK Tahun 2015-2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

Kehadiran LPPPTK KPTK yang berlokasi di Gowa Sulawesi Selatan ini berorientasi menjadi lembaga yang bekerja untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang terprogram dan sistematis pada bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi di seluruh Indonesia dan terkhusus di kawasan Indonesia timur. Pemilihan bidang garapan tersebut melalui pertimbangan bahwa: (1) kawasan Indonesia bagian timur memiliki potensi laut dan sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal; (2) akselerasi pergeseran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkembang secara dinamis semakin mewarnai percepatan perkembangan era global dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. TIK telah menjadi kebutuhan utama dalam dunia bisnis, pendidikan, dan perkantoran baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta nasional dan internasional.

Keberhasilan program yang dilaksanakan oleh LPPPTK KPTK tergantung pada seberapa besar tingkat kinerja/akuntabilitas kinerja yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. LPPPTK KPTK merupakan lembaga yang berdiri akhir Tahun 2014, baru merintis, dan menjalankan program-program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Tahun 2015. Tentu saja masih banyak hal yang perlu dibenahi dan butuh kerja keras dalam menyukseskan program-programnya. Terlebih lagi, lembaga tersebut masih sangat minim sumberdaya manusia (SDM). Tahun 2016, LPPPTK KPTK hanya memiliki 32 pegawai, yang terdiri 16 PNS (mutasi dari beberapa LPMP, PPPPTK BOE Malang, dan PPPPTK Pertanian Cianjur), serta 16 CPNS. Namun pada akhir Tahun 2016, ada penambahan 2 pegawai yaitu mutasi dari Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Maros dan BLKI Makassar. Selain itu 1 (orang) memasuki masa purnabakti/pensiun dari pegawai negeri sipil, sehingga saat ini pegawai LPPPTK KPTK Gowa berjumlah 33 orang.

LPPPTK KPTK dapat dikatakan telah berperan menjalankan program kerja selama 2 (dua) tahun. LPPPTK KPTK diharapkan tidak hanya mengejar seberapa besar anggaran yang telah dihabiskan (realisasi anggaran), tetapi juga harus berorientasi pada kinerja yang dihasilkan. Dalam hal ini, lembaga tersebut harus melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara benar. Untuk mengetahui keberhasilan kinerja LPPPTK KPTK maka perlu dilakukan evaluasi dan pelaporan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permen PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Permen PAN Nomor PER/20/M.PAN/U/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Permen PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2014;
13. Permendikbud Nomor 41 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tatakerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK);
14. Permendikbud Nomor 70 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPPPTK KPTK sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2014;
15. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2013, tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
16. Rencana Strategis Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK KPTK) Tahun 2015-2019.
17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan

Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK KPTK) Tahun Anggaran 2015, Nomor: DIPA-023.16.361168/2015.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Cita-cita dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, Pemerintah berupaya mengembangkan berbagai strategi penerapan standar nasional pendidikan dalam pembelajaran yang komprehensif melalui pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam upaya optimalisasi potensi kelautan perikanan di Indonesia sertaantisipasi perkembangan teknologi informatika komunikasi yang sangat cepat maka Pemerintah melalui LPPPTK KPTK diharapkan dapat mempersiapkan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten di bidang tersebut.

C.1. Tugas dan Fungsi

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi (LPPPTK KPTK) berdasarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja LPPPTK KPTK, dinyatakan: mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan dasar dan menengah di bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi. Dalam melaksanakan tugasnya LPPPTK KPTK menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Penyusunan model-model pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi,
- c. Pengembangan system dan pengelolaan data dan informasi pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan,
- d. Fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi,

- e. Pengembangan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi;
- f. Evaluasi program dan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi,
- g. Pelaksanaan urusan administrasi LPPPTK KPTK

LPPPTK KPTK berkoordinasi dengan beberapa instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Instansi-instansi tersebut adalah:

- a) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b) Badan Penelitian dan Pengembangan;
- c) Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota;
- d) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M);
- e) Unit pelaksana teknis yang menangani penjaminan mutu pendidikan;
- f) Unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C.2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi LPPPTK KPTK telah diuraikan dalam Permendikbud Nomor 18 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja LPPPTK KPTK. Susunan organisasi LPPPTK KPTK yang ada saat ini terdiri dari:

- a) Kepala
- b) Subbagian umum
- c) Seksi Program dan Informasi
- d) Seksi Fasilitasi Peningkatan Kompetensi
- e) Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan susunan organisasi tersebut, diuraikan tugas masing-masing unit sebagai berikut:

a) Kepala LPPPTK KPTK

Kepala LPPPTK KPTK mempunyai tugas untuk merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi. Pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPPPTK KPTK dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- 1) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerjasama baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
- 2) melaksanakan akuntabilitas kinerja;
- 3) melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala PPPPTK wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan LPPPTK KPTK. Selain itu, kepala menyampaikan hasil pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah kepada pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten.

b) Subbagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan LPPPTK KPTK, dengan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran LPPPTK KPTK,
- 2) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- 3) Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian, dan
- 4) Pelaksanaan urusan keuangan;

Dalam pelaksanaannya dibantu oleh staf yang menangani Tata Usaha dan Rumah Tangga, Tatalaksanaan dan Kepegawaian, dan Perencanaan dan Penganggaran yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Tata Usaha dan Rumah Tangga yang mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- b) Tatalaksanaan dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan ketatalaksanaan, serta mutasi, pengembangan, dan disiplin pegawai;
- c) Perencanaan dan Penganggaran yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pembiayaan, perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

c) Seksi Program dan Informasi

Seksi Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan program, kerjasama antar lembaga serta pengelolaan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 2) Pengembangan model-model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- 3) Pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 4) Pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- 5) Evaluasi program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam pelaksanaannya Seksi Program dan Seksi Data dan Informasi yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Staf yang menangani program, dengan tugas melakukan penyusunan program, evaluasi program, kerjasama antar lembaga, serta pengembangan model-model pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

- b) Staf yang menangani data dan Informasi dengan tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

d) Seksi Fasilitasi Peningkatan Kompetensi

Seksi Fasilitasi Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan evaluasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Fasilitasi Peningkatan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 2) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu, Staf Penyelenggaran dan Staf Evaluasi yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Staf Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan,
- b) Staf Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

e) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional widyaiswara dan atau jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala LPPPTK KPTK.
- c. Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan 1.1. Struktur Organisasi LPPPTK KPTK



Menurut Permendikbud Nomor 18 Tahun 2015, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan LPPPTK Bidang KPTK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

LPPPTK Bidang KPTK pada saat didirikan berdasarkan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2014 berada di bawah Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDM dan PMP). Namun setelah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPSDM dan PMP mengalami transformasi menjadi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK). Mengacu pada Visi dan Misi Kemendikbud 2015-2019 tersebut dan berdasar pada tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah ditetapkan rumusan Visi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan untuk diangkat dalam Renstra Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 2015-2019.

A. Visi dan Misi Ditjen GTK dan LPPPTK Bidang KPTK

Arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi objektif dalam 5 (Lima) tahun (Tahun 2015-2019), maka Ditjen Guru Dan Tenaga Kependidikan menetapkan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional, Sejahtera, dan Bermartabat serta Ekosistem yang berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”

Visi Ditjen GTK tersebut diarahkan untuk membawa Ditjen GTK menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penjelasan dari Visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional mencerminkan guru dan tenaga kependidikan yang memiliki sikap profesional, kreatif, inovatif, dan terus berusaha meningkatkan kompetensinya agar memiliki keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu melalui pendidikan profesi, serta

memahami bagaimana mengimplementasikan keilmuannya sesuai dengan kebutuhan subyek didik agar subyek didik dapat mengaktualisasi dirinya sendiri;

2. Sejahtera mencerminkan penghargaan terhadap profesi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan martabatnya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan profesional, serta perlindungan terhadap profesi guru dan tenaga kependidikan yang dapat memberikan jaminan rasa aman dalam berkarya membangun manusia agar harkat dan martabatnya dihargai oleh masyarakat.
3. Bermartabat mencerminkan sikap guru dan tenaga kependidikan yang memiliki martabat atau tingkat harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat dalam menjalankan peran dan fungsinya yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan, serta dapat menjadi tauladan yang baik bagi anak didiknya.
4. Ekosistem yang Berkarakter dapat dimaknai sebagai sebuah lingkungan dan seluruh unsur-unsur pendidikan yang mendukung terwujudnya pendidikan sebagai gerakan
5. Berlandaskan gotong royong dapat dimaknai sebagai kesadaran dan tanggungjawab banyak pihak untuk secara bersama, sukarela, merasa turut berkepentingan dengan keinginan saling menolong, dalam sebuah gerakan yang berlandaskan gotong royong terlibat aktif dalam pembangunan pendidikan untuk meningkatkan mutu dan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa.

Visi yang telah ditetapkan diupayakan dapat tercapai. Untuk mendukung berjalannya Visi tersebut, maka diperlukan penetapan Misi organisasi. Misi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 2015-2019 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Kemendikbud 2019 mewujudkan pendidikan dan kebudayaan bermutu untuk membentuk insan Indonesia yang mandiri dan berkepribadian. Rumusan Misi yang diangkat di dalam Renstra Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 2015-2019 didasarkan pada isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan untuk lima tahun ke depan. Misi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan untuk mencapai Visi Ditjen Guru dan

Tenaga Kependidikan tahun 2019. Misi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. Misi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Kode	Misi
MD.1	Mewujudkan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Berkinerja Baik
MD.2	Mewujudkan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional dan Sejahtera
MD.3	Mewujudkan Penataan dan Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan yang Meluas, Merata dan Berkeadilan
MD.4	Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektif

Berdasarkan Tabel 2.1, menjelaskan terdapat 3 (tiga) misi yang ditetapkan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015-2019. Makna dari Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Berkinerja Baik adalah mendorong peningkatan kualitas sikapnya dalam aspek kepribadian, spiritual dan sosial guru dan tenaga kependidikan dan berdampak pada meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia (NAWA CITA 5) dan revolusi karakter bangsa (NAWA CITA 8).
2. Mewujudkan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional dan Sejahtera adalah menerapkan sistem pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang menjamin meningkatnya subject knowledge dan pedagogical knowledge yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa; mewujudkan mutu lulusan pendidikan yang kompeten (sikap, pengetahuan, dan keterampilan), mandiri, berkepribadian, dan kompetitif; mendorong penciptaan inovasi dan kreativitas yang mendukung peningkatan daya saing dan kesejahteraan rakyat.
3. Mewujudkan Penataan dan Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan yang Meluas, Merata dan Berkeadilan adalah memastikan ketersediaan guru dan tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan, di seluruh wilayah Indonesia, di perkotaan maupun pedesaan bahkan sampai di daerah terdepan, terluar, dan terpencil, dengan tingkat pendidikan dan kompetensi yang memadai sesuai standar yang ditetapkan serta menjamin

pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan tersebut tanpa membedakan status ekonomi, kondisi fisik/mental, asal wilayah, gender dan agama

4. Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pelibatan Publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola guru dan tenaga kependidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Ditjen GTK yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien

Visi Misi LPPPTK Bidang KPTK

Pencapaian tujuan suatu organisasi diperlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata. Untuk dapat mewujudkannya tujuan organisasi maka diperlukan visi dan misi. Visi adalah suatu pandangan jauh tentang organisasi, tujuan-tujuan organisasi, dan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut di masa mendatang. Sedangkan Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usaha mewujudkan Visi. LPPPTK Bidang KPTK dalam mewujudkan tujuan lembaga sebagai bentuk perencanaan, maka ditetapkan Visi dan Misi organisasi. Visi LPPPTK Bidang KPTK adalah:

“Terwujudnya Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional, Berkepribadian, dan Bermartabat dalam bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk membentuk insan Indonesia yang Mandiri dan Berkepribadian”

Guru dan tenaga kependidikan yang profesional, berkepribadian, dan bermartabat yang dimaksud adalah:

- a. Kompeten, guru dan tenaga kependidikan harus kompeten sesuai bidang keahliannya. Guru dan Tenaga Kependidikan harus dilatih secara periodik dengan materi diklat yang Relevan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi guru dan Tendik dan relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah, serta kesepakatan global

- b. Karakter, guru dan tenaga kependidikan harus menjadi teladan bagi siswa. Pembinaan karakter guru dilakukan dengan bimbingan dan pendampingan di sekolah.
- c. Mutu pengelolaan, berstandar internasional dengan menggunakan standar manajemen ISO yang selalu ditingkatkan secara terus menerus (*Continuous improvment*).
- d. Akses layanan merata untuk seluruh wilayah/daerah di Indonesia.

Pernyataan Visi tersebut harus dapat diwujudkan melalui Misi organisasi. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Dengan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh. Untuk mencapai Visi, maka Misi yang ditetapkan LPPPTK Bidang KPTK dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Misi LPPPTK Bidang KPTK

Kode	Misi
M1	Meningkatkan mutu dan relevansi layanan diklat
M2	Meningkatkan sistem pengelolaan lembaga yang menjamin terselenggaranya layanan diklat yang prima
M3	Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses layanan diklat
M4	Meningkatkan akses kerjasama dalam meningkatkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam skala global

Layanan diklat harus ditingkatkan secara terus menerus, standar pelayanan yang dilakukan oleh LPPPTK Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah meskipun lembaga baru yang belum memiliki sertifikat ISO 9001:2008 akan tetapi LPPPTK KPTK berusaha sekuat mungkin untuk menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai standar manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2008, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui perbaikan yang berkelanjutan. Layanan diklat yang diberikan selalu mengacu kepada hasil pemetaan kompetensi yang dilakukan melalui Uji Kompetensi, agar relevan dengan kebutuhan pelanggan (Peserta diklat) dan juga diharapkan dampak dari layanan diklat ini relevan juga bagi peningkatan mutu

pendidikan (Mutu lulusan), adanya kebijakan baru dan adanya teknologi yang baru dan harus dimiliki oleh guru.

Peningkatan mutu layanan diklat meliputi kegiatan :

- Penyusunan Standar Kompetensi Guru (SKG)
- Uji kompetensi
- Pemetaan kompetensi PTK
- Penyusunan program diklat berkelanjutan untuk PTK (Pola diklat)
- Perbaikan dan pengembangan sarana prasarana diklat
- Peningkatan mutu sumberdaya manusia (SDM) lembaga
- Pengkajian dan pengembangan model-model diklat
- Pengelolaan dan penyelenggaraan diklat sesuai prosedur ISO
- Evaluasi proses penyelenggaraan dan dampak diklat
- Penyusunan laporan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan.
- Pengembangan system diklat
- Peningkatan kerjasama dengan lembaga terkait

Peningkatan relevansi layanan diklat dilakukan melalui pengembangan inovasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat, baik dalam hal pendidikan maupun dalam hal teknologi lainnya yang berkaitan dengan substansi kompetensi pada setiap jenis mata diklat. Sebagai lembaga pengembang dan pemberdaya PTK maka LPPPTK Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi harus kaya dengan informasi tentang Iptek. Pengayaan Iptek dapat dilakukan dengan mengadopsi, mengadaptasi dan melakukan eksplorasi gagasan/ide dari perkembangan Iptek itu sendiri. Melalui pengayaan IPTEK ini diharapkan diklat yang diselenggarakan oleh LPPPTK Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi selalu relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan PTK dan kebutuhan kehidupan bermasyarakat serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Sesuai dengan misi Kemendikbud, maka layanan diklat harus **tersedia dan terjangkau** secara merata diseluruh pelosok nusantara dan untuk seluruh lapisan masyarakat. Agar layanan diklat dapat merata pada seluruh wilayah nusantara, maka LPPPTK Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai unit pelaksana teknis (PTK) dari lembaga pusat, akan terus berusaha mencari alternatif untuk memperluas akses layanan diklat yang dapat menjangkau seluruh

wilayah nusantara. Beberapa program yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut:

- a) **Diklat Dalam Jaringan (Daring)**, yaitu melakukan layanan diklat jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- b) **Diklat Daring Kombinasi**, merupakan gabungan antara dalam jaringan dan tatap muka. Interaksi belajar secara daring dilakukan secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pembelajaran yang telah disiapkan secara elektronik, dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, sedangkan interaksi tatap muka dilaksanakan bersamaan dengan peserta GP lainnya di pusat belajar (PB)
- c) **Diklat Tatap Muka**, yaitu terjadi interaksi secara langsung antara fasilitator dengan peserta pembelajaran. pelaksanaan diklat di lokasi ibukota kabupaten/kota, atau ibukota propinsi dengan mendekati sasaran sehingga bisa menjangkau sasaran lebih banyak dan efisiensi biaya. Selain itu untuk memancing kepedulian daerah agar juga peduli dengan peningkatan kompetensi para gurunya dengan dana sharing.
- d) **Program Pembentukan dan Pemberdayaan MGMP/MKKS/ MKKPS**, akan mendorong MGMP/MKKS/MKKPS untuk terus berinovasi guna peningkatan kompetensi para anggotanya.
- e) **Pengembangan sistem diklat**, dengan sistem diklat yang baik maka akan mampu memberikan layanan yang baik dan memuaskan bagi para guru.

LPPPTK Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi bertekad akan terus memantapkan program-program tersebut sambil mencari bentuk-bentuk layanan diklat lain yang dapat mempercepat ketercapaian pemerataan dan perluasan akses layanan.

Pelayanan diklat yang prima bagi peserta diklat/pelanggan eksternal merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh LPPPTK Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tertuang didalam Visi. Pencapaian layanan yang prima bagi pelanggan eksternal harus dimulai dari pengembangan sistem tata kelola lembaga yang mengarah kepada pencapaian kinerja yang baik. LPPPTK Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai organisasi harus memiliki struktur dengan organ-organ yang relevan dengan pencapaian dari tujuan organisasi tersebut, sesuai dengan ketentuan Permendiknas nomor 8 tahun 2007 tentang organisasi dan tatakerja PPPPTK.

Pencapaian visi “*Terwujudnya Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional, Berkepribadian, dan Bermartabat dalam bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk membentuk insan Indonesia yang Mandiri dan Berkepribadian.*” maka LPPPTK Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah sepakat menggunakan nilai-nilai lembaga baik, seperti yang telah tertuang dalam renstra Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud, sebagai berikut:

1. **Memiliki Integritas**
Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.
2. **Kreatif dan Inovatif**
Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.
3. **Inisiatif**
Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.
4. **Pembelajar**
Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan mejadikan pelajaran atas setiap kejadian.
5. **Menjunjung Meritokrasi**
Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.
6. **Terlibat Aktif**
Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.
7. **Tanpa Pamrih**
Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi

pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis LPPPTK Bidang KPTK

Upaya mewujudkan visi dan melaksanakan misi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, perlu dirumuskan langkah-langkah yang lebih operasional secara terarah dalam bentuk tujuan strategis. Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2015—2019 dirumuskan mengacu pada tujuan strategis Kemendikbud 2019 yaitu: (T1) penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orangtua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; dan (T2) peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter, yang diperlukan untuk mewujudkan guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan yang mulia, profesional dan sejahtera untuk membentuk insan Indonesia yang berkarakter sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Visi 2019 Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dengan memperhatikan rumusan misi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 2015—2019. Sebagai penjabaran dari pernyataan misinya, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2015-2019. Tujuan strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Berdasarkan tujuan strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang tetap memperhatikan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta misi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, LPPPTK Bidang KPTK merumuskan tujuan strategis Tahun 2015-2019 sesuai jenis layanan pemberdayaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme, serta sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima terhadap peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan. Tujuan strategis LPPPTK Bidang KPTK diturunkan dari tujuan strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Tujuan strategis LPPPTK Bidang KPTK tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.3. Tujuan Strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Kode	Tujuan Strategis
TD.1	Penguatan Peran Guru dan Tenaga Kependidikan dalam Ekosistem Pendidikan
TD.2	Peningkatan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan untuk Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
TD.3	Peningkatan Penataan dan Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan yang Meluas, Merata dan Berkeadilan
TD.4	Peningkatan Sistem Tata Kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Tabel 2.4. Tujuan Strategis LPPPTK Bidang KPTK

Kode	Tujuan Strategis
TSL.1	Peningkatan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi untuk Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
TSL.2	Peningkatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lainnya yang kompeten
TSL.3	Peningkatan Sistem Tata Kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis 1 (TSL.1): Peningkatan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi untuk Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu. Peningkatan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan untuk Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu merupakan penjabaran untuk mengukur tercapainya Misi 2 Ditjen GTK (MD.2): Mewujudkan Guru dan Tenaga

Kependidikan yang Profesional dan Sejahtera. Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, karena guru adalah inti dari proses pendidikan dan guru menjadi kunci utama mutu pendidikan. Oleh karena itu diperlukan: (i) sistem pembinaan yang menjamin meningkatnya subject knowledge dan pedagogical knowledge yang berdampak pada kualitas hasil belajar siswa; (ii) peningkatan profesionalisme guru antara lain melalui: penerapan sistem uji kompetensi guru, peningkatan kualifikasi akademik, dan sertifikasi guru, serta pengembangan profesionalisme berkelanjutan bagi guru dalam jabatan; dan (iii) pengembangan karir tanpa membedakan status ekonomi, kondisi fisik/mental, asal wilayah, gender dan agama.

2. Tujuan Strategis 2 (TSL.2): Penguatan Peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Lainnya untuk mewujudkan PTK yang Berkinerja Baik. PTK yang dimaksud adalah Guru Dikdas yang ditingkatkan kompetensinya, kepala sekolah dan pengawas sekolah.
3. Tujuan Strategis 3 (TSL.3): Peningkatan Sistem Tata Kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik. Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pelibatan Publik. Peningkatan akuntabilitas kinerja Ditjen GTK bertujuan untuk menjaga agar tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja Ditjen GTK dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama. Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi harus terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan Ditjen GTK menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan.

C. Sasaran Strategis LPPPTK Bidang KPTK

Sasaran strategis merupakan suatu keluaran yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran strategis LPPPTK Bidang KPTK diturunkan dari sasaran strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan membuat sasaran strategis dari 3 (tiga) tujuan strategis yang ditetapkan. Begitu pula, sasaran strategis LPPPTK Bidang KPTK diturunkan dari sasaran strategis Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang dijabarkan dari 4 (empat) tujuan strategisnya. Sasaran strategis LPPPTK Bidang KPTK tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya tujuan Strategis 1 (TSL-1): Peningkatan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi untuk Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu. Penjabaran sasaran strategis LPPPTK KPTK untuk mewujudkan tujuan strategis 1 (TSL.1) dapat ditandai dengan tercapainya sasaran program (SSL) pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Sasaran strategis LPPPTK Bidang KPTK untuk mencapai Tujuan strategis TSL.1

Kode	Sasaran Strategis LPPPTK KPTK (SSL)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis LPPPTK KPTK (IKSSL)
SSL.1	Meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru, pendidik dan tenaga kependidikan bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi yang professional minimal 75%.

SSL 1 merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan (TSL.1) Guru dan Pendidik Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Tenaga Kependidikan yang Profesional untuk

mewujudkan pembelajaran yang bermutu, dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter. Guru yang baik adalah guru yang memiliki 4 (empat) kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan berkepribadian. Dengan demikian, SSL 1 dan SSL 2 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan (TSL.1) penguatan peran guru dan pendidik Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi serta tenaga kependidikan sebagai pelaku pendidikan.

2. Terwujudnya Tujuan Strategis 2 (TSL.2): Penguatan Peran Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran program (SP) seperti pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Sasaran strategis LPPPTK Bidang KPTK untuk mencapai Tujuan strategis TSL.2

Kode	Sasaran Strategis LPPPTK KPTK (SSL)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis LPPPTK KPTK (IKSSL)
SSL.2	Meningkatnya kualitas sikap pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.	Persentase guru, pendidik dan tenaga kependidikan bidang lainnya sebanyak 80%.

SSL merupakan sasaran strategis yang berorientasi pada penguatan peran pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pelaku pendidikan yang kuat. SP 2 lebih menitikberatkan pada kualitas sikap dan kinerja guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah, yang kesemuanya diharapkan berdampak pada meningkatnya karakter/perilaku positif pada siswa.

3. Terwujudnya Tujuan Strategis 3 (TSL-3): Peningkatan Sistem Tata Kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik. Penjabaran sasaran strategis LPPPTK Bidang

KPTK untuk mewujudkan tujuan strategis 3 (TL.3) dapat ditandai dengan tercapainya sasaran SSL 3 pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Sasaran strategis LPPPTK Bidang KPTK untuk mencapai Tujuan strategis TSL.3

Kode	Sasaran Strategis LPPPTK KPTK (SSL)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis LPPPTK KPTK (IKSSL)
SSL.3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja LPPPTK KPTK	Skor LAKIP minimal 80

Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel, yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Indikator ini diantaranya dapat ditandai dengan meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan; dan meningkatnya akuntabilitas kinerja lembaga.

D. Program dan Kegiatan LPPPTK Bidang KPTK

Pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis yang telah ditetapkan LPPPTK Bidang KPTK melaksanakan Layanan Pemberdayaan dan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Program Guru dan Tenaga Kependidikan, dan kegiatan utama yaitu pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan. Pelaksanaan kegiatan tahun 2016, didasarkan pada DIPA Nomor 023.16.2.361168/2016 tanggal 7 Desember 2015, dengan total anggaran Rp 111.971.703.000. Namun dalam perkembangannya, DIPA LPPPTK KPTK mengalami 6 (enam) kali revisi. Untuk lebih jelasnya, revisi DIPA LPPPTK KPTK Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel 2.8 dan Gambar 2.1.

Tabel 2.8. DIPA LPPPTK KPTK Tahun Anggaran 2016, beserta perubahan-perubahannya selama tahun 2016.

No	Uraian	Tanggal	Anggaran	Perubahan	Keterangan
1	DIPA Awal	07-12-2015	Rp 111,971,703,000		Penetapan DIPA LPPPTK KPTK
2	Revisi I	04-02-2016	Rp 111,971,703,000		Buka blokir Rp 31.428.678.000
3	Revisi II	10-03-2016	Rp 100,485,873,000	Rp 11,485,830,000	Pengurangan Pagu
4	Revisi III	31-05-2016	Rp 100,485,873,000		Blokir Tahap I - Rp 533.378.000
5	Revisi IV	26-07-2016	Rp 93,807,614,000	Rp 6,678,259,000	Pengurangan Pagu
6	Revisi V	20-09-2016	Rp 93,807,614,000		Blokir Tahap II - Rp 20.280.194.000
7	Revisi VI	28-10-2016	Rp 103,129,484,000	Rp 11,485,830,000	Penambahan Pagu (Keahlian Ganda)



Gambar 2.1. DIPA LPPPTK KPTK Tahun Anggaran 2016, beserta perubahan-perubahannya selama tahun 2016.

Penjelasan Tabel 2.8 dan Gambar 2.1 tentang DIPA LPPPTK KPTK Tahun Anggaran 2016 dan perubahan-perubahannya selama tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Revisi pertama disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada tanggal 4 Februari 2016. Total anggaran LPPPTK KPTK setelah revisi pertama ini sama dengan DIPA Awal (7 Desember 2015) yakni Rp 111.971.703.000. DIPA tersebut dilakukan pembukaan blokir Rp 31.428.678.000,- pada Belanja Modal.
- 2) Revisi Kedua ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada tanggal 10 Maret 2016. Anggaran pada revisi kedua ini berkurang atau mengalami pemotongan sebesar Rp 11.485.830.000,-

dari DIPA Revisi Pertama. Total anggaran LPPPK KPTK pada revisi kedua adalah Rp 100.485.873.000,-.

- 3) Revisi Ketiga ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada tanggal 31 Mei 2016. Total anggaran LPPPTK KPTK revisi ketiga sama dengan DIPA Revisi Kedua yakni Rp 100.485.873.000,-. Namun pada revisi ini terjadi pemblokiran tahap I sebesar Rp 533.378.000,-.
- 4) Revisi Keempat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada tanggal 26 Juli 2016. Anggaran pada revisi keempat berkurang sebesar Rp 6.678.259.000,- dari DIPA Revisi Ketiga. Total anggaran LPPPK KPTK pada revisi Keempat adalah Rp 93.807.614.000,-.
- 5) Revisi Kelima ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada tanggal 20 September 2016. Total anggaran LPPPTK KPTK revisi Kelima sama dengan DIPA Revisi Keempat yakni Rp 93.807.614.000,-. Revisi kelima ini terjadi pemblokiran tahap II sebesar Rp 20.280.194.000,-.
- 6) Revisi Keenam ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada tanggal 28 Oktober 2016. Anggaran pada revisi keenam ini berbeda dengan revisi yang sebelumnya. Jika sebelumnya, anggaran terus berkurang, namun kali ini anggaran bertambah sebesar Rp 9.321.870.000,-. Penambahan ini diprioritaskan untuk kegiatan sosialisasi/pembekalan keahlian ganda. Dengan demikian total anggaran revisi keenam adalah Rp 103.129.484.000,-.

Penjabaran kegiatan utama LPPPTK KPTK (Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan) selama tahun 2016 pada DIPA awal hingga revisi ketiga sebanyak 12 output. Namun pada DIPA revisi keempat hingga keenam, output yang dicapai berkurang menjadi 11. Output kegiatan tersebut adalah:

- 1) Guru Dikdas Mapel Tematik yang Ditingkatkan Kompetensinya
- 2) Guru Produktif dan Adaptif yang Ditingkatkan Kompetensinya menurut Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 3) Kepala Sekolah yang Ditingkatkan Kompetensinya.
- 4) Pengawas yang Ditingkatkan Kompetensinya.

- 5) Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran.
- 6) Dokumen Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Pelaporan Ketatausahaan.
- 7) Layanan Perkantoran
- 8) Kendaraan Bermotor
- 9) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- 10) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- 11) Gedung/Bangunan

E. Rencana Kinerja Tahunan

Berdasarkan Permeneg PAN-RB dan Kebijakan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja/unit kerja perlu disusun ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berdasarkan ketentuan tersebut LPPPTK Bidang KPTK menyusun Rencana Kinerja Tahunan disajikan pada Tabel 2.9.

Berdasarkan Tabel 2.9, dapat dilihat target kinerja terdapat perbedaan jumlah sasaran fisik. Sasaran yang berubah adalah Guru Dikdas Mapel Tematik, Guru Produktif dan Adaptif Bidang KPTK, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah. DIPA revisi Pertama, jumlah sasaran Guru Dikdas sebanyak 32.744 orang menjadi 27.888 orang pada DIPA revisi terakhir. Sasaran Guru Produktif dan Adaptif bidang KPTK sebanyak 320 orang pada DIPA revisi I menjadi 2.720 orang pada DIPA revisi terakhir. Sasaran Kepala Sekolah awalnya 20 orang menjadi 550 orang; pengawas sekolah semula 133 orang menjadi 31 orang.

F. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Permeneg PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010, pasal 3 menyatakan Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Tabel 2.9

Rencana Kinerja Tahunan LPPPTK Bidang KPTK

Unit Eselon III : LPPPTK Bidang KPTK

Tahun : Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
		Fisik (DIPA Revisi 1)	Fisik (DIPA Revisi VI)	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kualitas Sikap dan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan.	Guru Dikdas Mapel Tematik yang Ditingkatkan Kompetensinya	32.744	27.888	Orang
	Guru Produktif dan Adaptif yang Ditingkatkan Kompetensinya menurut Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi	320	2.720	Orang
	Kepala Sekolah yang Ditingkatkan Kompetensinya	20	550	Orang
	Pengawas yang Ditingkatkan Kompetensinya	133	31	Orang
	Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran.	1	1	Model
Peningkatan akuntabilitas kinerja LPPPTK KPTK	Persentase satuan kerja lingkup LPPPTK Bidang KPTK meningkat kualitas layanan, manajemen sumber daya, dan tata laksana.	12	12	Bulan

LPPPTK Bidang KPTK wajib menyusun perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja tingkat eselon II yang ditandatangani oleh Kepala LPPPTK Bidang KPTK sebagai kontrak kinerja. Penetapan kinerja berisi sasaran

strategis, indikator kinerja, target kinerja LPPPTK Bidang KPTK yang dicapai dalam kurun waktu satu tahun (2016) sesuai target rencana strategis. Berikut adalah Penetapan Kinerja LPPPTK Bidang KPTK tahun 2016. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan penjabaran dari DIPA awal LPPPTK KPTK Tanggal 7 Desember 2015, Nomor DIPA 023.16.2.361168. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang ditandatangani Kepala LPPPTK Bidang KPTK dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, disajikan pada Tabel 2.10. Namun dalam selama Tahun 2016, DIPA LPPPTK KPTK mengalami penyesuaian dan revisi sebanyak 6 (enam) kali. Dengan demikian, perjanjian kinerja menyesuaikan revisi DIPA terakhir pada Tanggal 28 Oktober 2016. Perjanjian kinerja revisi terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.11.

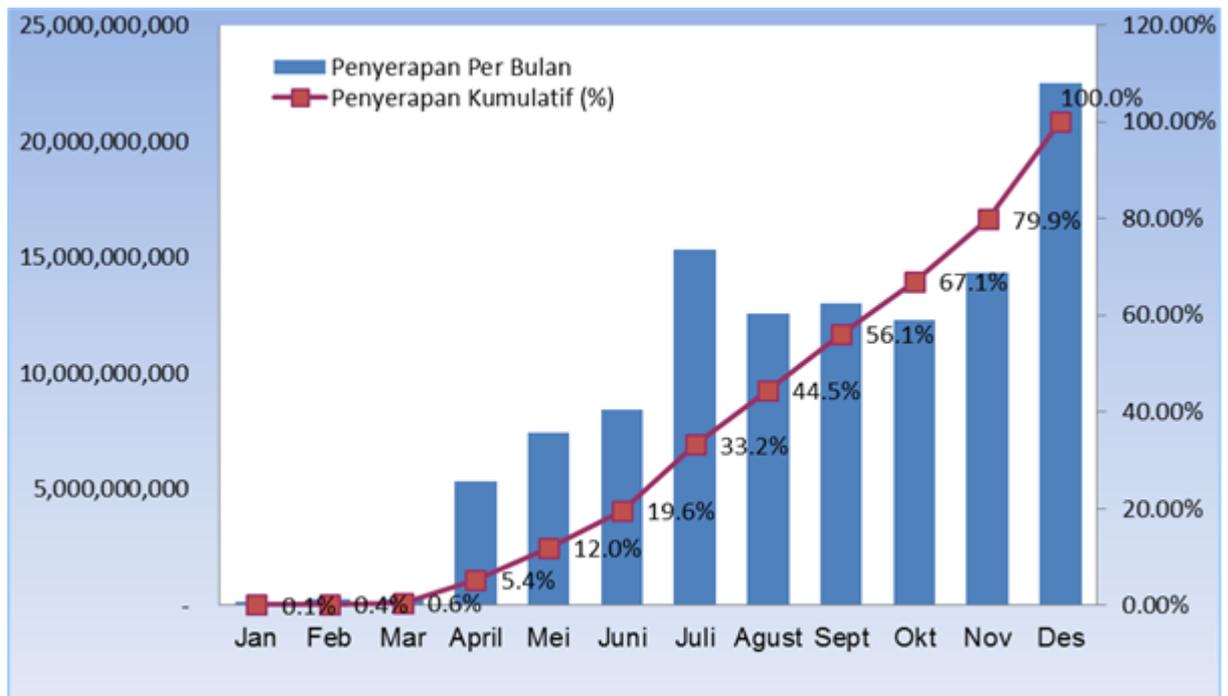
Tabel 2.10. Perjanjian Kinerja LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2016 (DIPA Awal), Target Capaian Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	
			TARGET	ANGGARAN (ribuan)
1.	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya	Jumlah guru yang berkompeten bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	320 orang	5.413.530
		<i>OUTPUT:</i>		
		1. <i>Guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi.</i>	320 orang	2.910.260
		2. <i>Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran</i>	1 model (170 Judul)	2.503.270

	Pengawas yang kompeten	133 orang	372.730
	<i>OUTPUT:</i> <i>Pengawas yang ditingkatkan kompetensinya</i>	133 orang	372.730
	Jumlah kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten	20 orang	3.325.000
	<i>OUTPUT:</i> <i>Kepala Sekolah yang Ditingkatkan Kompetensinya</i>	20 orang	3.325.000
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang kompeten	52.062 orang	11.361.773
	<i>OUTPUT:</i> <i>Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah mengikuti Uji Kompetensi</i>	52.062 orang	11.361.773
	Jumlah guru yang berkompoten bidang Tematik	32.744 orang	51.247.655
	<i>OUTPUT:</i> <i>Guru Dikdas Mapel Tematik Prov. Sulselbar, Papua, dan Papua Barat yang ditingkatkan kompetensinya</i>	32.744 orang	51.247.655

Jumlah total anggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar **Rp. 111.971.703.000 (Seratus Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah).**

Gambar 2.2. Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2016 (DIPA Awal) LPPPTK KPTK



No	Komponen	Jan (dalam ribuan)	Feb (dalam ribuan)	Mar (dalam ribuan)	April (dalam ribuan)	Mei (dalam ribuan)	Juni (dalam ribuan)	Juli (dalam ribuan)	Agust (dalam ribuan)	Sept (dalam ribuan)	Okt (dalam ribuan)	Nov (dalam ribuan)	Des (dalam ribuan)
1	Penyerapan Bulanan	148,515	254,188	293,536	5,342,947	7,416,252	8,441,438	15,310,103	12,580,747	12,991,742	12,308,875	14,360,942	22,522,418
2	Penyerapan Kumulatif	148,515	402,703	696,239	6,039,186	13,455,438	21,896,876	37,206,979	49,787,726	62,779,468	75,088,343	89,449,285	111,971,703
4	% Penyerapan bulanan	0.13%	0.23%	0.26%	4.77%	6.62%	7.54%	13.67%	11.24%	11.60%	10.99%	12.83%	20.11%
3	% Penyerapan kumulatif	0.13%	0.36%	0.62%	5.39%	12.02%	19.56%	33.23%	44.46%	56.07%	67.06%	79.89%	100.00%

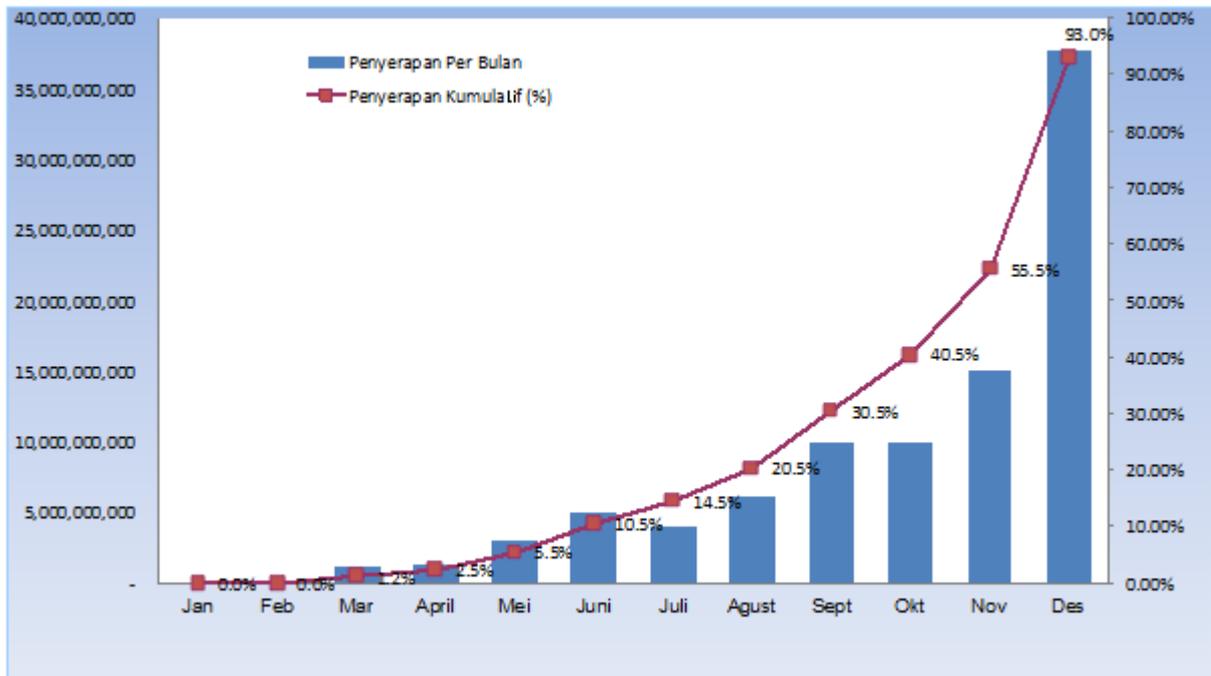
Tabel 2.11. Perjanjian Kinerja LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2016 (DIPA revisi terakhir), Target Capaian Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	
		TARGET	ANGGARAN (ribuan)
1. Meningkatnya kompetensi	Jumlah guru yang berkompeteren bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.720 orang	15.522.470

pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya	<i>OUTPUT:</i> 1. <i>Guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi.</i>	2.720 orang	13.019.200
	2. <i>Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran</i>	1 model (170 Judul)	2.503.270
	Pengawas yang kompeten	31 orang	199.076
	<i>OUTPUT:</i> <i>Pengawas yang ditingkatkan kompetensinya</i>	31 orang	199.076
	Jumlah kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten	550 orang	2.380.514
<i>OUTPUT:</i> <i>Kepala Sekolah yang Ditingkatkan Kompetensinya</i>	550 orang	2.380.514	
Jumlah guru yang berkompoten bidang Tematik	27.888 orang	44.147.492	
<i>OUTPUT:</i> <i>Guru Dikdas Mapel Tematik Prov. Sulsebar, Papua, dan Papua Barat yang ditingkatkan kompetensinya</i>	27.888 orang	44.147.492	

Jumlah total anggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar **Rp. 103.129.484.000,- (Seratus Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).**

**Gambar 2.3. Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2016 (DIPA Revisi)
LPPPTK KPTK Gowa**



No	Komponen	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Penyerapan Bulanan	-	30,145,762	1,135,490,365	1,306,316,349	3,014,576,190	5,024,293,650	4,019,434,920	6,029,152,380	10,048,587,300	10,048,587,300	15,072,880,950	37,682,202,375
2	Penyerapan Kumulatif	0	30,145,762	1,165,636,127	2,471,952,476	5,486,528,666	10,510,822,316	14,530,257,236	20,559,409,616	30,607,996,916	40,656,584,216	55,729,465,166	93,411,667,541
3	%Penyerapan bulanan	0.00%	0.03%	1.13%	1.30%	3.00%	5.00%	4.00%	6.00%	10.00%	10.00%	15.00%	37.50%
4	% Penyerapan kumulatif	0.00%	0.03%	1.16%	2.46%	5.46%	10.46%	14.46%	20.46%	30.46%	40.46%	55.46%	92.96%

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas berdasarkan arti katanya merupakan gambaran suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika didefinisikan, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi suatu organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi.

LPPPTK KPTK sebagai instansi pemerintah yang bercita-cita menuju *good govermentance*, maka akuntabilitas kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting. Akuntabilitas kinerja LPPPTK KPTK merupakan gambaran pertanggungjawaban mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Analisis Capaian Sasaran

LPPPTK KPTK telah menetapkan target capaian kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 2016. Untuk itu lembaga ini berkewajiban mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Capaian sasaran peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai bidang kelautan perikanan dan teknologi informasi merupakan program utama LPPPTK KPTK yang didasarkan pada salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ditjen GTK. Dalam menyusun dan menetapkan target kinerja dan programnya, lingkungan kerja di Kementerian Pendidikan mengacu pada beberapa kriteria, yaitu:

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran, yakni; Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

2. Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan pada baseline data yang jelas.

Keberhasilan pencapaian target kinerja di lingkup Ditjen GTK dilihat target kinerja sasaran program dan target kinerja sasaran kegiatan. Indikator target kinerja sasaran program yaitu:

- a) Sasaran program 1 (SP.1): Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik menjabarkan Indikator Kinerja Program (IKP) yakni Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki indeks kinerja minimal baik.
- b) Sasaran program 2 (SP.2): Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari Kompetensi Profesional, Pedagogik, Kepribadian, dan Sosial yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa, menguraikan Indikator Kinerja Program (IKP) terdiri atas: (1) persentase guru bersertifikat pendidik; (2) peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 8,0; (3) persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi berkelanjutan; (4) persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sesuai standar; (5) persentase guru dan tenaga kependidikan yang meningkat karirnya; (6) persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kesejahteraan dan perlindungan.
- c) Sasaran program 3 (SP.3): meningkatkan ketersediaan dan distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata di seluruh Kabupaten/Kota menguraikan Indikator Kinerja Program (IKP) yakni persentase satuan pendidikan memiliki GTK sesuai dengan standar.

Selain Indikator target kinerja sasaran program, terdapat yaitu: 5 (Lima) Indikator target kinerja sasaran kegiatan yaitu:

- a) Sasaran Kegiatan 1 (SK 1): Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya mengandung Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) antara lain:
 - Jumlah guru yang berkompeten bidang TK/PLB
 - Jumlah guru yang berkompeten bidang IPA
 - Jumlah guru yang berkompeten bidang IPS dan Kewarganegaraan
 - Jumlah guru yang berkompeten bidang Matematika
 - Jumlah guru yang berkompeten bidang Penjas dan BK

- Jumlah guru yang berkompeten bidang Bahasa
 - Jumlah guru yang berkompeten bidang Seni dan Budaya
 - Jumlah guru yang berkompeten bidang Bisnis dan Pariwisata
 - Jumlah guru yang berkompeten bidang Pertanian
 - Jumlah guru yang berkompeten bidang Mesin dan Teknik Industri
 - Jumlah guru yang berkompeten bidang Otomotif dan Elektronika
 - Jumlah guru yang berkompeten bidang Bangunan dan Listrik
 - Jumlah guru yang berkompeten bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - Jumlah guru yang berkompeten lainnya yang kompeten.
 - Jumlah Kepala Sekolah yang kompeten.
 - Jumlah pengawas sekolah yang kompeten
 - Jumlah guru yang berkompeten bidang Tematik
- b) Sasaran Kegiatan 2 (SK.2), Meningkatnya tata kelola dan system pengendalian di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.
- c) Sasaran kegiatan 3 (SK 3), Ketersediaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas yang berkompeten, bermartabat, dan professional mengandung 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).
- d) Sasaran kegiatan 4 (SK 4), Meningkatnya professionalism guru pendidikan dasar, terdiri 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:
- Jumlah guru Dikdas yang bersertifikat pendidik
 - Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru pendidikan dasar.
 - Jumlah guru Dikdas yang meningkat indeks kinerja dan kualitas sikapnya.
 - Jumlah guru pendidikan dasar yang terfasilitasi pengembangan karirnya.
 - Jumlah guru pendidikan dasar yang memperoleh peningkatan kesejahteraan dan harlindung.
 - Jumlah guru Dikdas penerima tunjangan khusus.
 - Jumlah pendidikan dasar yang memiliki rasio guru dan siswa sesuai dengan standar.
 - Jumlah guru pendidikan dasar minimal berkualifikasi S1/D4.
- e) Sasaran kegiatan 5 (SK 5), Ketersediaan guru pendidikan menengah yang berkompeten, bermartabat, dan professional, terdiri 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

- Jumlah guru Dikmen yang bersertifikat pendidik
 - Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru Dikmen mencapai 8.0.
 - Jumlah guru Dikmen yang meningkat indeks kinerja dan kualitas sikapnya.
 - Jumlah guru Dikmen yang terfasilitasi pengembangan karirnya.
 - Jumlah guru Dikmen yang memperoleh peningkatan kesejahteraan dan harlindung.
 - Jumlah guru Dikdas penerima tunjangan khusus.
 - Jumlah pendidikan Dikmen yang memiliki rasio guru dan siswa sesuai standar.
 - Jumlah guru pendidikan menengah minimal berkualifikasi S1/D4.
- f) Ketersediaan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah yang berkompeten, bermartabat, dan professional, meliputi 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Keberhasilan pencapaian target kinerja LPPPTK KPTK dapat ditentukan berdasarkan Indikator Kinerja Program Lembaga (IKPL) dan Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga (IKKL). IKPL dan IKKL LPPPTK KPTK tersebut diturunkan IKP dan IKK Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. IKPL dan IKKL LPPPTK KPTK diuraikan sebagai berikut:

- a) Sasaran Program Lembaga 1 (SPL.1): Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari Kompetensi Profesional, Pedagogik, Kepribadian, dan Sosial yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa, menguraikan 2 (dua) Indikator Kinerja Program (IKP) terdiri atas: (1) peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 8,0; (2) persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi berkelanjutan. SPL 1 ini merupakan penjabaran SP 1 Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan.

Selanjutnya Indikator target kinerja sasaran kegiatan (IKK) LPPPTK KPTK, dijabarkan dari 3 (tiga) sasaran kegiatan lembaga (SKL), yang meliputi:

- a) Sasaran Kegiatan Lembaga 1 (SKL 1): Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya. SKL 1 ini merupakan penjabaran

SK 1 Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. SKL 1 mengandung Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga (IKKL) antara lain:

- Jumlah guru yang berkompeten bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - Jumlah Kepala Sekolah yang kompeten.
 - Jumlah pengawas sekolah yang kompeten
 - Jumlah guru yang berkompeten bidang Tematik
- b) Sasaran kegiatan lembaga 2 (SKL 2), Meningkatnya professionalism guru pendidikan dasar. SKL 2 ini merupakan penjabaran SK 4 Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. SKL 2 terdiri 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga (IKKL), yaitu Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru pendidikan dasar.
- c) Sasaran Kegiatan Lembaga 3 (SKL 3), Meningkatnya professionalism guru pendidikan menengah. SKL 3 ini merupakan penjabaran SK 5 Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. SKL 3 terdiri 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga (IKKL), yaitu Rata-rata nilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan guru pendidikan menengah.

Ketercapaian kegiatan LPPPTK KPTK dilihat berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2016. Pengukuran ini dengan mempertimbangkan 11 (sebelas) output yaitu: (1) Guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi; (2) Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran; (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti uji kompetensi; (4) Guru Dikdas Mapel Tematik yang ditingkatkan kompetensinya; (5) Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya; (6) Pengawas yang ditingkatkan kompetensinya; (7) Dokumen Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Pelaporan Ketatausahaan, (8) Layanan Perkantoran; (9) Kendaraan Bermotor; (10) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; dan (11) Gedung/Bangunan. Dalam rangka mendukung keberhasilan 4 (empat) output kegiatan tersebut, terdapat sasaran strategi untuk dukungan manajemen, yang terdiri atas: layanan perkantoran, kendaraan bermotor, peralatan dan fasilitas perkantoran, dan gedung/bangunan. Untuk lebih jelasnya, tingkat keberhasilan kinerja dengan anggaran Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Tanpa Blokir		Alokasi dengan Blokir		Realisasi					
		Fisik	Anggaran (Ribuan)	Fisik	Anggaran (Ribuan)	Fisik	%	Anggaran (Ribuan)	%		
1	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Jumlah guru yang berkompeten bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi.		2,720 Orang	15,522,470,000	3,072 Orang	14,592,913,000	3,046	99.6%	13,667,070,730	93.7%
		Output :									
		1. Guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi		2,720 Orang	13,019,200,000	3,072 Orang	13,019,200,000	3,046	99.2%	12,261,450,030	94.2%
		2. Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran		1 Model	2,503,270,000	1 Model	1,573,713,000	1	100%	1,405,620,700	89.3%
		Jumlah kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten		550 Orang	2,380,514,000	150 Orang	574,829,000	77	51.3%	434,154,900	75.5%
		Output :									
		Kepala sekolah yang ditingkatkan kompetensinya		550 Orang	2,380,514,000	150 Orang	574,829,000	77	51.3%	434,154,900	75.5%
		Jumlah pengawas sekolah yang kompeten		31 Orang	199,076,000	20 Orang	126,710,000	12	60.0%	62,181,500	49.1%
		Output :									
		Pengawas sekolah yang ditingkatkan kompetensinya		31 Orang	199,076,000	20 Orang	126,710,000	12	60.0%	62,181,500	49.1%
Jumlah guru yang berkompeten bidang Tematik		27,888 Orang	44,147,492,000	14,886 Orang	27,667,332,000	14,665	98.5%	26,926,310,450	97.3%		
Output :											
Guru Dikdas Mapel Tematik yang ditingkatkan kompetensinya		27,888 Orang	44,147,492,000	14,886 Orang	27,667,332,000	14,665	98.5%	26,926,310,450	97.3%		
2	Dukungan Manajemen	Akuntabilitas Kinerja Lembaga									
		Output :									
		1 Dokumen Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Pelaporan Ketatausahaan		2 Dok	1,889,092,000	2 Dok	959,535,000	2	100%	948,492,200	98.8%
		2 Layanan Perkantoran		12 Bulan	6,098,492,000	12 Bulan	6,098,492,000	12	100%	5,877,333,044	96.4%
		3 Kendaraan Bermotor		3 Unit	733,130,000	3 Unit	733,130,000	3	100%	731,300,000	99.8%
		4 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		20 Unit	807,070,000	20 Unit	807,070,000	20	100%	744,817,300	92.3%
		5 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		47 Unit	1,935,186,000	47 Unit	1,935,186,000	47	100%	1,698,024,300	87.7%
		6 Gedung dan Bangunan		10 Paket	30,314,279,000	10 Paket	29,354,093,000	9.8	98%	24,770,973,000	84.4%

Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan LPPPTK Bidang KPTK, setelah melalui proses hingga akhir tahun 2016, terjadi sedikit perubahan terhadap target/rencana fisik kegiatan dan merubah jumlah alokasi anggaran. Perubahan-perubahan dikarenakan penyesuaian kebutuhan sasaran fisik yang cukup esensial untuk pengembangan kapasitas tenaga pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, perubahan sasaran dan alokasi anggaran karena adanya pemblokiran. Perubahan-perubahan karena pemblokiran anggaran adalah: (1) guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang KPTK, semula memiliki target fisik sebanyak 2.720 orang menjadi 3.072 orang; (2) kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang ditingkatkan kompetensinya, awalnya ditargetkan sebanyak 550 orang, kemudian menjadi 150 orang; (3) pengawas sekolah yang kompeten, awalnya 31 orang menjadi 20 orang; (4) Guru dikdas mata pelajaran tematik yang ditingkatkan kompetensinya, semula 27.888 orang menjadi 14.886 orang. Berikut diuraikan secara rinci hasil setiap kegiatan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan DIPA revisi VI (terakhir).

1. Guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang KPTK

Capaian program guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi (KPTK) ditinjau dari segi fisik program dan anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Perbandingan rencana dengan realisasi program dan anggaran program guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang KPTK Tahun 2016.

		Anggaran	Sasaran
Rencana	Rp	13,019,200,000,00	3.072 Pendidik
Realisasi	Rp	12,261,450,030,00	3.046 Pendidik

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa program guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang KPTK dari alokasi anggaran sebesar Rp 13.019.200.000 dapat terealisasi sebesar Rp 12.261.450.030. Sementara itu, berdasarkan sasaran fisik 3.072 pendidik dapat terealisasi sebanyak 3.046 pendidik. Dengan demikian, persentase

realisasi anggaran sebesar 94.18%, dan persentase capaian output/fisik sebesar 99.15%. Kegiatan tersebut terbagi atas 2 sub-bagian output adalah Pelatihan IN program guru pembelajar bidang KPTK dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Sub-output tersebut sebagai berikut:

a. Pelatihan IN Program Guru Pembelajar Bidang KPTK

Pelatihan Instruktur Nasional (IN) program guru pembelajar bidang KPTK merupakan pelatihan yang diperuntukan bagi guru-guru yang mempunyai nilai UKG di atas rata-rata. Pelatihan IN ini dimaksudkan untuk menjaring guru-guru yang berkompeten dan lulus menjadi mentor program guru pembelajar bidang KPTK. Tugas IN ini antara lain:

- Mempersiapkan dan mempelajari perangkat pelatihan sesuai moda.
- Membelajarkan, melatih, membimbing, dan mengevaluasi peserta.
- Melaporkan hasil ketercapaian belajar peserta.

Pelatihan IN program guru pembelajar bidang KPTK dalam sub-output ini dijabarkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu Pelatihan IN Program Guru Pembelajar Bidang TIK SMA/SMK dan Diklat PKB Guru Mapel SMA dan SMK. Realisasi capaian sub-output ini ditampilkan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3. Realisasi capaian Pelatihan IN Program Guru Pembelajar Bidang KPTK

No	Uraian Komponen Input	Capaian Output			Keuangan		
		Sasaran	Realisasi	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelatihan IN Program Guru Pembelajar Bidang TIK SMA/SMK	320	317	99.06	2,478,620,000	2,475,862,400	99.89
2	Diklat PKB Guru Mapel SMA dan SMK	110	107	97.27	1,548,880,000	1,352,402,800	87.31

Berdasarkan Tabel 3.3, menjelaskan bahwa pada kegiatan pelatihan IN program guru pembelajar bidang TIK SMA/SMK terdapat sasaran 320 orang dan terealisasi sebanyak 317 orang. Jika dihitung, persentase ketercapaian komponen ini yaitu sebesar 99.06%. Pencapaian nilai ini tergolong besar, karena tingkat kehadiran peserta dalam setiap kegiatan pelatihan sangat tinggi. Pelatihan IN tersebut dilaksanakan sebanyak 2 (tiga) angkatan.

- Angkatan pertama dilaksanakan di LPMP Sulawesi Selatan (Mata Pelajaran TIK SMA/SMK), BP PAUDNI Makassar (Mapel Teknik Komputer Jaringan dan Rekayasa Perangkat Lunak), PPPPTK BMTI Bandung (Mata Pelajaran TIK SMA/SMK), PPPPTK TK PLB Bandung

(Mapel Rekayasa Perangkat Lunak dan Multimedia), dan PPPPTK PKn IPS Malang (Mata Pelajaran TIK SMA/SMK, Teknik Komputer Jaringan dan Rekayasa Perangkat Lunak).

- Angkatan Kedua dilaksanakan di PPPPTK TK PLB Bandung (Mapel Teknik Komputer Jaringan dan Multimedia), dan PPPPTK PKn IPS Malang (Mata Pelajaran Multimedia).

Selanjutnya, pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PKB guru Mapel SMA/SMK dalam sub-ouput ini merupakan Diklat Vokasi Mapel Kelautan dan Perikanan. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Same Makassar, khususnya bagi guru-guru bidang keahlian budidaya rumput laut, sedangkan di BPPP Banyuwangi diperuntukan bagi guru bidang keahlian NKPI, TKP, dan NKN. Dalam RKAKL, sasaran untuk diklat vokasi ini sebanyak 110 orang, namun peserta yang hadir sebanyak 107 orang, terdiri atas 47 di BPPP Banyuwangi dan 60 orang di Hotel Same Makassar. Realisasi capaian diklat ini sebesar 97,27%.

b. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)

Sub-output pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) terdiri atas 7 (tujuh) komponen. Komponen tersebut yaitu Assessment Calon Assessor LSP, Ujicoba Perangkat Assesment, Penyusunan Dokumen Free Assesment, Pelaksanaan Assesment, Pembekalan Peserta dan Pendampingan, Pengelolaan Sekretariat LSP Program Keahlian Ganda Guru SMK, dan Workshop Pengembangan Model USBN. Realisasi capaian pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Realisasi capaian pengembangan keprofesian berkelanjutan

No	Uraian Komponen Input	Sasaran (Org)	Realisasi (Org)	%	Keuangan		
					Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Assessment Calon Assessor LSP	25	23	92	62,212,000	46,261,150	0.74
2	Ujicoba Perangkat Assesment	15	15	100	30,620,000	27,950,000	0.91
3	Penyusunan Dokumen Free Assesment	15	15	100	30,620,000	25,960,000	0.85
4	Pelaksanaan Assesment	25	24	96	116,620,000	79,573,000	0.68
5	Pembekalan Peserta dan Pendampingan	2,470	2,453	99.3	8,087,288,000	7,597,332,180	0.94
6	Pengelolaan Sekretariat LSP Program Keahlian Ganda Guru SMK	2	2	100	93,508,000	90,670,500	0.97
7	Workshop Pengembangan Model USBN	90	90	100	383,482,000	381,538,000	0.99

Berdasarkan tabel 3.4, dapat dilihat bahwa kegiatan calon assessor LSP, jumlah peserta yang diundang sebanyak 25 orang, namun yang hadir

sebanyak 23 orang atau persentase sebesar 92. Asesement calon asesor LSP dilaksanakan di Politeknik Pertanian (Politani) Negeri Pangkep. Peserta diantaranya Dosen dan Mahasiswa Politani Negeri Pangkep; Dosen Universitas Negeri Makassar (UNM); dan staf LPPPTK KPTK Gowa. Sedangkan Narasumber berasal dari BNSP. Pelaksanaan kegiatan selama 2 hari (26 s.d 27 November 2016). Ujicoba Perangkat Assesment diselenggarakan pada 2 (dua) tempat yaitu Fakultas Teknik UNM dan Politani Negeri Pangkep. Peserta pada kegiatan ujicoba perangkat assessment sama dengan peserta assessment calon assessor, tetapi pada kegiatan ini ada penambahan peserta dari guru SMKN 1 Palangga, SMKN 2 Barru, SMK Muhammadiyah Bontoala, dan SMKN 4 Takalar. Pelaksanaannya selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 2 s.d 3 Desember. Penyusunan Dokumen Free Assessment dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 6 Desember 2016.

2. Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran

Model pemberdayaan sekolah dan pengembangan inovasi pembelajaran hanya terdapat 1 (satu) model berupa pengembangan standar system diklat di Institusi. Output ini terdiri atas 2 (dua) sub-output sebagai pendukung keberhasilan model pemberdayaan sekolah dan pengembangan inovasi pembelajaran. Sub-ouput itu adalah rakornas dan workshop pengembangan modul; dan pengembagan model-model pelatihan. Realisasi capaian output ini dapat dilihat pada tabel 3.5. Berdasarkan pada tabel 3.5, dapat dilihat bahwa realisasi sub output Rakornas dan workshop pengembangan modul secara fisik sebesar 81.1%, dan realisasi keuangan sebesar 88.84%. Realisasi fisik hanya mencapai 81.1% karena pada kegiatan workshop persiapan pengembangan modul, peserta yang diundang hanya hadir 50% (undangan 60 orang, hadir 30 orang).

Tabel 3.5. Realisasi capaian model pemberdayaan sekolah dan pengembangan inovasi pembelajaran

No	Uraian Komponen Input	Sasaran (Orang)	Realisasi (Orang)	%	Keuangan		
					Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
051	Rakornas dan Workshop Pengembangan Modul	133	99	81.1	621,413,000	558,176,800	88.84%
1	Rakornas Penyiapan Bahan Ajar dan Pelaksanaan PKB GP	13	13	100	314,668,000	312,011,200	99.16%
2	Workshop Persiapan Pengembangan Modul	60	30	50	113,025,000	109,345,000	96.74%
3	Workshop Uji Publik/Revisi dan Finalisasi Modul	60	56	93.3	193,720,000	136,820,600	70.63%
052	Pengembangan Model-model Pelatihan	75	75	100	952,300,000	847,443,900	92.06%
1	Pengembangan Naskah Daring	70	70	100	272,050,000	269,943,900	99.23%
2	Digitalisasi dan Unggah Naskah	5	5	100	680,250,000	577,500,000	84.90%

3. Guru Dikdas Mapel Tematik yang Ditingkatkan Kompetensinya

LPPPTK Bidang KPTK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan dan pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan, tentunya banyak melakukan program yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru. Selain tugas pokok pengembangan guru kelautan, perikanan, teknologi informasi, dan komunikasi, salah satu kegiatan utama yang dijalankan oleh LPPPTK KPTK adalah Guru Dikdas mapel tematik yang ditingkatkan kompetensinya. Kegiatan ini terdiri atas:

- a) Workshop Persiapan Pelaksanaan PKB Guru Pembelajar, yang dijabarkan workshop persiapan pelaksanaan PKB guru pembelajar, rakor penyamaan persepsi pemanfaatan modul GP, bimtek operator/pendamping pusat kegiatan belajar, dan rakor persiapan PKB guru pembelajar mitra LPPPTK KPTK, serta promosi dan pameran KPTK. Realisasi capaian workshop persiapan pelaksanaan PKB Guru Pembelajar dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Realisasi capaian workshop persiapan pelaksanaan PKB Guru Pembelajar

No	Uraian Komponen Input	Sasaran (Orang)	Realisasi (Orang)	%	Keuangan		
					Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
051	Workshop Persiapan Pelaksanaan PKB Guru Pembelajar	898	884	99.38	3,990,054,000	3,889,912,650	98.11%
1	Workshop Persiapan Pelaksanaan PKB Guru Pembelajar	82	82	100.00	147,457,000	146,609,000	99.42%
2	Rakor Penyamaan Persepsi Pemanfaatan Modul GP	40	40	100.00	63,720,000	62,127,000	97.50%
3	Bimtek Operator/Pendamping Pusat Kegiatan Belajar	450	436	96.89	1,656,247,000	1,560,489,950	94.22%
4	Rakor Persiapan PKB Guru Pembelajar Mitra LP3TK KPTK	320	320	100.00	2,049,475,000	2,047,922,700	99.92%
5	Promosi dan Pameran KPTK	6	6	100.00	73,155,000	72,764,000	99.47%

Berdasarkan pada Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa realisasi secara fisik workshop persiapan pelaksanaan PKB Guru Pembelajar mencapai 99.38% (sasaran 898 orang dan realisasi 884 orang), sedangkan berdasarkan anggaran hanya mencapai 98,11% yakni alokasi dana sebesar Rp 3.990.054.000, hanya dibelanjakan sebesar Rp 3.889.912.650. Dari 5 (lima) komponen dalam sub-output ini, secara fisik terdapat 4 (empat) komponen yang mencapai 100% yaitu workshop persiapan pelaksanaan PKB guru pembelajar (dilaksanakan di Hotel Colonial Makassar pada bulan Januari), rakor penyamaan persepsi pemanfaatan modul GP (diselenggarakan di BP PAUDNI Makassar pada bulan April), rakor persiapan PKB guru pembelajar mitra LPPPTK KPTK

(dilaksanakan di beberapa hotel di Makassar), serta promosi dan pameran KPTK (dilaksanakan di Bogor pada bulan November).

- b) Diklat IN PKB Guru Pembelajar Jenjang Dikdas, terbagi menjadi: (1) Diklat Persiapan IN PKB Guru Pembelajar TIK SMP; (2) Diklat Persiapan IN PKB Guru Pembelajar Jenjang SD (Sulselbar); (3) Diklat Persiapan IN PKB Guru Pembelajar Jenjang SD (Papua dan Papua Barat); dan (4) Diklat IN Guru Pembelajar (SD/SMP/SMA/SMK) Tambahan/Susulan. Realisasi capaian sub-output ini disajikan pada tabel 3.7. Berdasarkan tabel 3.7, dapat dilihat bahwa realisasi sub output secara fisik sebesar 87.38% (sasaran 1.270 orang, hadir 1.159 orang), sedangkan realisasi keuangan sebesar 99.40% (alokasi Rp 10.359.292.000, realisasi Rp 10.198.965.200).

Tabel 3.7 Realisasi capaian pendidikan dan pelatihan instruktur nasional PKB guru pembelajar jenjang Dikdas

No	Uraian Komponen Input	Sasaran (Orang)	Realisasi (Orang)	%	Keuangan		
					Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
052	Diklat IN PKB Guru Pembelajar Jenjang Dikdas	1,270	1,159	87.38	10,359,292,000	10,198,965,200	99.40%
1	Diklat Persiapan IN PKB Guru Pembelajar TIK SMP	80	67	83.75	493,698,000	490,183,500	99.29%
2	Diklat Persiapan IN PKB GP Jenjang SD (Sulselbar)	400	399	99.75	2,735,950,000	2,715,054,100	99.24%
3	Diklat Persiapan IN PKB GP Jenjang SD (Papua, Papua Barat)	280	187	66.79	2,322,704,000	2,315,345,200	99.68%
4	Diklat IN Guru Pembelajar (SD/SMP/SMA/SMK) Tambahan	510	506	99.22	4,806,940,000	4,678,382,400	97.33%

Diklat persiapan IN PKB guru pembelajar TIK SMP dilaksanakan di beberapa tempat yaitu LPMP Sulawesi Selatan (tanggal 10 s.d 20 Juni 2016), PPPPTK BMTI Bandung (tanggal 9 s.d 18 Juni 2016), PPPPTK PKn IPS (tanggal 9 s.d 18 Juni 2016).

Diklat persiapan IN PKB guru pembelajar Jenjang SD dilaksanakan sebanyak 4 (empat) angkatan dan beberapa tempat. **Angkatan pertama**, diselenggarakan tanggal 21 s.d 30 Juni 2016 pada 6 (enam) lokasi secara serentak yaitu LPMP Sulawesi Selatan, Hotel Berkah Mamuju, BP PAUDNI Makassar, PPPPTK IPS PKn Malang, Pondok Madinah Makassar, dan PPPPTK TK PLB Bandung. **Angkatan kedua**, diselenggarakan tanggal 13 s.d 22 Juli 2016 pada 4 lokasi yaitu Pondok Madinah Makassar, BP Paudni Makassar, LPMP Sulawesi Selatan, dan LPMP Provinsi Papua. Angkatan Ketiga, diselenggarakan tanggal 28 Juli

s.d 6 Agustus di Hotel Mariat Sorong Papua Barat, tanggal 30 Juli s.d 8 Agustus di Hotel Grand Abe Jayapura.

Sementara itu, Diklat IN guru pembelajar tambahan/susunan dilaksanakan tanggal 22 s.d 31 Agustus 2016 pada 5 (lima) hotel di Makassar yaitu Hotel Dalton, Hotel Raising, Hotel Jakarta, Hotel Fave, Hotel Aerotel Smile, dan Hotel Same. Realisasi secara fisik mencapai 99.22% (sasaran 510 orang, hadir 506 orang). Sedangkan realisasi keuangan sebesar 97.33% (alokasi Rp 4,806,940,000, realisasi Rp 4,678,382,400).

c) PKB Guru Pembelajar Moda Kombinasi

Kegiatan PKB guru pembelajar moda kombinasi terdiri atas 2 (dua) komponen yaitu sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan GP Daring Kombinasi; dan Pelaksanaan diklat GP Daring Kombinasi. GP daring kombinasi ini dilaksanakan di 33 Kabupaten/kota, meliputi 26 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan, 3 Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat, 2 Kabupaten/kota Provinsi Papua, 2 Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat. Realisasi sub output PKB GP moda daring kombinasi disajikan pada tabel 3.8. Berdasarkan tabel 3.8, menunjukkan bahwa secara fisik, realisasi capaian sub output GP daring kombinasi mencapai 99.25% (sasaran 12.718 orang, hadir 12.622 orang), dan realisasi keuangan sebesar 96.39% (alokasi Rp 13.317.986.000, realisasi Rp 12.837.432.600). Namun jika dilihat berdasarkan pelaksanaan diklat GP daring kombinasi, realisasi fisik mencapai 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp 97.01% (alokasi Rp 12.168.836.000, realisasi Rp 11.805.101.600).

Tabel 3.8 Realisasi capaian PKB GP moda daring kombinasi

No	Uraian Komponen Input	Sasaran (Orang)	Realisasi (Orang)	%	Keuangan		
					Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
053	PKB Guru Pembelajar Moda Kombinasi	12,718	12,622	99.25	13,317,986,000	12,837,432,600	96.39%
1	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan GP Daring Kombinasi	200	104	52	1,149,150,000	1,032,331,000	89.83%
2	Pelaksanaan Diklat Daring Kombinasi II	12,518	12,518	100	12,168,836,000	11,805,101,600	97.01%

4. Kepala Sekolah yang Ditingkatkan Kompetensinya

LPPPTK Bidang KPTK selain selain tugas pokok pengembangan guru kelautan, perikanan, teknologi informasi, dan komunikasi, serta Guru Dikdas mapel tematik, lembaga ini juga melakukan peningkatan kompetensi kepala sekolah. Realisasi Output ini dapat dilihat pada tabel 3.9. Berdasarkan tabel 3.9, dapat dilihat bahwa realisasi capaian output kepala sekolah yang ditingkatkan kompetensinya secara fisik adalah sebesar 51,33% (setelah adanya blokir anggaran, sasaran kepala sekolah menjadi 150 orang, dengan realisasi 77 orang). Sedangkan realisasi keuangan sebesar 75.53% (alokasi anggaran Rp 574.829.000, terealisasi sebesar Rp 434.254.900). Sasaran kepala sekolah pembelajar yang dilatih adalah wilayah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga untuk efektifitas dan efisiensi, kegiatan ini dilaksanakan di LPMP Sulawesi Barat pada Bulan Oktober 2016.

Tabel 3.9 Realisasi capaian Kepala Sekolah Pembelajar

No	Uraian Komponen Input	Sasaran (Org)	Realisasi (Org)	%	Keuangan		
					Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
052	Pelatihan Fasilitator Pengembangan Profesi KS Pembelajar	150	77	51.33	574,829,000	434,154,900	75.53
1	Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan KS Pembelajar	47	30	63.83	58,720,000	34,010,500	0.58
2	Pelatihan Fasilitator Kepala Sekolah Pembelajar	22	8	36.36	90,330,000	57,155,000	0.63
3	Pelatihan Operator SIM Diklat Kepala Sekolah Pembelajar	22	8	36.36	28,780,000	15,500,500	0.54
4	Penjaminan Mutu Program Kepala Sekolah Pembelajar	-	-	0.00	53,240,000	7,406,900	0.14
5	Lokakarya Operator TUK KS Pembelajar dan Pelaksanaan UK	27	-	0.00	10,800,000	10,792,000	1.00
6	Lokakarya Evaluasi Hasil KS Pembelajar	24	23	95.83	92,959,000	69,290,000	0.75
124	Pemberian Bantuan Pemerintah - Bantuan Kelompok Kerja	8	8	100.00	240,000,000	240,000,000	100
A	tanpa sub komponen	8	8	100.00	240,000,000	240,000,000	100

5. Pengawas Sekolah yang Ditingkatkan Kompetensinya

Sasaran Pengawas sekolah yang ditingkatkan kompetensinya adalah di wilayah Sulawesi Barat. LPPPTK KPTK Gowa melaksanakan kegiatan ini di LPMP Sulawesi Barat pada Bulan Oktober 2016, bersamaan dengan pelatihan Kepala Sekolah Pembelajar. Realisasi anggaran sebesar 49.07% (alokasi Rp 126.710.000, realisasi Rp 62.181.500). Secara fisik, realisasi capaian output pelatihan ini sebesar 60% (jumlah peserta yang diundang sebanyak 20 orang, namun hanya hadir 12 orang). Hal ini disebabkan karena pengawas yang terdata sebelumnya sebagai peserta sasaran pelatihan, namun sekarang telah beralih profesi ke instansi lain.

6. Sasaran Strategis Dukungan Manajemen

Sasaran strategis dukungan manajemen dan tata kelola fasilitasi peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, dijabarkan menjadi 6 (enam) output yaitu:

- a. Dokumen Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Pelaporan Ketatausahaan
- b. Layanan perkantoran
- c. Kendaraan bermotor, pengadaan kendaraan operasional roda 4
- d. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- e. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
- f. Gedung/bangunan.

Capaian kinerja sasaran strategis dukungan manajemen secara fisik, setiap output mencapai realisasi 100%, kecuali gedung dan bangunan hanya 97.5%. Secara rinci realisasi capaian dukungan manajemen disajikan pada table 3.9. Berdasarkan tabel 3.10, dapat dilihat bahwa secara fisik output gedung/bangunan hanya mencapai 97.5%. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pekerjaan konstruksi Laboratorium TIK yang terbilang lambat. Hingga akhir Desember 2016, masih tergolong konstruksi dalam pekerjaan (KDP). Sementara pekerjaan lain pembuatan sumur, pembangunan Menara, tower air; renovasi wisma, gedung asrama, ruang belajar, gedung aula, dan gedung kantor sudah selesai 100%.

Pengadaan kendaraan operasional kantor dengan sasaran 3 unit, terealisasi pembelian 3 unit mobil operasional kantor yaitu 1 unit Toyota Rush dan 2 unit Toyota Avanza. Pengadaan kendaraan ini melalui proses *e-purchasing* LKPP pada bulan April 2016. Sedangkan pengadaan pengolah data dan komunikasi melalui lelang elektronik di LPSE Kemdikbud bulan Agustus, kemudian pengerjaan bulan September. Pengolah data dan komunikasi yang dimaksud berupa computer PC, laptop, dan alat pengolah data lainnya untuk menunjang kegiatan perkantoran.

Tabel 3.10. Realisasi capaian program dukungan manajemen

No	Uraian Komponen Input	Sasaran (Org)	Realisasi (Org)	%	Keuangan		
					Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5634.023	Dokumen Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Pelaporan Ketatausahaan	2	2	100	959,535,000	948,492,200	98.85
001	Dokumen Ketatausahaan, Kehumasan, dan Kerumahtanggaan	2	2	100	959,535,000	948,492,200	98.85
055	Peningkatan Kompetensi SDM/Pegawai	129	129	100	959,535,000	948,492,200	98.85
A	Persiapan Pengembangan Sistem E-CBT	100	100	100	159,530,000	158,687,500	99.47
B	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Lembaga	1	1	100	708,059,000	707,859,000	99.97
C	Peningkatan Kompetensi SDM/Pegawai	20	20	100	32,426,000	32,425,700	100.00
D	Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Lembaga	8	8	100	59,520,000	49,520,000	83.20
5634.994	Layanan Perkantoran	12	12	100	6,098,492,000	5,877,333,044	88.71
001	Gaji dan Tunjangan	12	12	100	1,858,139,000	1,648,323,594	88.71
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12	12	100	1,858,139,000	1,648,323,594	88.71
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	12	100	4,240,353,000	4,229,009,450	99.73
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran (LPPPTK KPTK Gowa)	12	12	100	1,303,229,000	1,292,784,000	99.20
B	Langganan Daya dan Jasa (LPPPTK KPTK Gowa)	12	12	100	629,508,000	629,499,050	100
C	Pemeliharaan Kantor (LPPPTK KPTK Gowa)	12	12	100	971,620,000	971,071,850	99.94
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor (LPPPTK KPTK Gowa)	12	12	100	1,321,262,000	1,321,233,050	100
E	Jasa Pengiriman Dokumen	12	12	100	14,734,000	14,421,500	97.88
5634.995	Kendaraan Bermotor	3	3	100	733,130,000	731,300,000	99.75
001	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Roda 4	3	3	100	733,130,000	731,300,000	99.75
007	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor	3	3	100	733,130,000	731,300,000	99.75
A	Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Roda 4	3	3	100	701,810,000	701,800,000	100.00
B	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	3	3	100	31,320,000	29,500,000	94.19
5634.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	20	20	100	807,070,000	744,817,300	92.29
001	Pengadaan Alat Pengolah Data	20	20	100	807,070,000	744,817,300	92.29
007	Pengadaan Alat Pengolah Data	20	20	100	807,070,000	744,817,300	92.29
A	Pengadaan Pengolah Data	20	20	100	807,070,000	744,817,300	92.29
5634.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	47	47	100	1,935,186,000	1,698,024,300	87.74
001	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	47	47	100	1,935,186,000	1,698,024,300	87.74
007	PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN	47	47	100	1,935,186,000	1,698,024,300	87.74
A	Fasilitas dan Peralatan	47	47	100	1,935,186,000	1,698,024,300	87.74
5634.998	Gedung/Bangunan	1	1	97.50	29,354,093,000	24,770,973,000	84.39
001	Pembangunan Gedung Penujang Pelaksanaan TUSI	1	1	97.50	29,354,093,000	24,770,973,000	84.39
008	Gedung dan Bangunan	1	1	97.50	29,354,093,000	24,770,973,000	84.39
A	Pembangunan Gedung Laboratorium TIK	1	0.8	80	23,575,860,000	19,471,213,500	82.59
B	Pembuatan Gardu Induk Listrik PLN	1	1.0	100	145,990,000	142,000,000	97.27
C	Pembuatan Sumur, Pembangunan Menara, Serta Tower Air	1	1	100	1,956,013,000	1,717,424,800	87.80
D	Renovasi Wisma	1	1	100	379,390,000	336,641,000	88.73
E	Renovasi Gedung Asrama	1	1	100	637,550,000	617,891,400	96.92
F	Renovasi Ruang Belajar	1	1	100	1,176,861,000	1,104,834,000	93.88
G	Renovasi Gedung Aula	1	1	100	714,839,000	675,120,000	94.44
H	Renovasi Gedung Kantor	1	1	100	767,590,000	705,848,300	91.96

Berdasarkan tabel 3.10, menunjukkan bahwa realisasi anggaran terkecil untuk dukungan manajemen lembaga adalah layanan perkantoran. Realisasi anggaran hanya mencapai 88,71% (alokasi anggaran Rp 6.098.492.000, realisasi Rp 5.877.333.044). Hal ini dikarenakan LPPPTK Bidang KPTK merupakan lembaga baru yang dibentuk pada Tahun 2014 berdasarkan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPPPTK KPTK. Sebagai lembaga baru, LPPPTK KPTK pasti sangat kekurangan sumberdaya manusia yang bekerja di dalamnya. Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang bekerja menjalankan program/kegiatan Tahun 2016, LPPPTK KPTK merekrut tenaga kontrak tambahan sebanyak 20 orang. Jumlah ini jika dibandingkan dengan kebutuhan pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi LPPTK Bidang KPTK sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan seluruh Indonesia, tentu masih sangat minim.

LPPPTK Bidang KPTK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seyogyanya memiliki fasilitas utama dan pendukung untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi guru, khususnya bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi. Bangunan/gedung yang akan dibangun oleh LPPPTK Bidang KPTK tentunya harus mengacuh pada kaidah-kaidah master plan yang sesuai.

- Acuan regulasi secara nasional dan daerah yang berkaitan dengan pembangunan gedung Negara/bangunan.

Pembangunan gedung Negara harus mengacuh pada kaidah-kaidah atau regulasi yang berlaku secara nasional maupun daerah yang bersangkutan. Meskipun kondisi gedungnya yang tidak terawatt dengan baik, namun secara umum pembangunan gedung LPPPTK Bidang KPTK belum sepenuhnya serasi dengan rencana tata ruang sebagai acuan utama di dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan untuk pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Sebagai bahan pertimbangan, rancangan pembangunan gedung dan infrastruktur LPPPTK KPTK pada dasarnya harus berada dalam koridor

pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang telah mengamanatkan pentingnya memperhatikan keseimbangan antara aspek bangunan dan lingkungannya. Bagitupula mengacuh pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dan Undang-undang Jalan (UU Nomor 38 Tahun 2004) yang mewajibkan agar dalam pengelolaan sumberdaya air maupun jalan sungguh-sungguh memperhatikan kelestarian lingkungan. Undang-undang Penataan Ruang (UU Nomor 26 Tahun 2007) menjadi payung hukum dalam menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang baik skala kawasan maupun wilayah. Ketentuan lebih lanjut dari UU tersebut, yaitu peraturan-peraturan pelaksanaannya berupa Norma, standar, pedoman dan manual (NSPM), sudah diterapkan pada desain pembangunan LPPPTK KPTK yang berwawasan lingkungan, sebagaimana diamanatkan dalam UU tersebut.

Kebijakan pembangunan LPPPTK Bidang KPTK harus menerapkan konsep pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan (green building dan green infrastructure), mempertahankan dan mendorong peningkatan prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap kawasan budidaya lainnya, mempertahankan kawasan konservasi, mewujudkan konsep ecocity, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan dalam setiap aspek pelaksanaan pembangunan infrastruktur lembaga.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Adapun pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) haruslah memiliki konsep dalam melaksanakan kegiatan pembangunannya, yaitu: (a) Konsep pembangunan, (b) Konsep lingkungan, (c) Konsep sosial budaya.

Selain itu, sejumlah peraturan mengenai bangunan gedung dan penataan lingkungan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Disamping itu, terdapat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; dan (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung.

Secara regulasi daerah yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gowa, menerangkan bahwa Kecamatan Pattallassang (sebagai lokasi kawasan LPPPTK KPTK) merupakan salah satu kawasan strategi kabupaten (KSK); kota idaman berwawasan lingkungan Kota Baru Mamminasata, kawasan perkotaan satelit Pattallassang, serta kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Konsep berwawasan lingkungan tersebut yang menjadi focus perencanaan dan pengembangan bangunan dan infrastruktur kawasan LPPPTK KPTK. Tolok ukur dari konsep ini adalah mengharmonikan infrastruktur dan bangunan dalam jaringan dan lingkup yang lebih luas, terkait aspek-aspek iklim, sumberdaya alam, ekonomi, serta sosial budaya. Implementasi kebijakan konsep ini sepenuhnya perlu didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan yang berwawasan atau ramah lingkungan. Olehnya itu, dalam pengembangan teknologi, rancangan dan arsitektur bangunan, metodologi pembangunan, material dan bahan yang digunakan, serta efisiensi penggunaan energy dan sumberdaya air, termasuk prinsip-prinsip dasar 3R (reduce = mengurangi, reuse = menggunakan kembali, recycling = mendaur ulang) dalam setiap pelaksanaan pembangunan.

- Perencanaan Kawasan/Bangunan Menggunakan Pendekatan ASEAN

Indonesia telah meratifikasi ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) melalui Keppres Nomor 88 Tahun 1995. Dalam perjanjian tersebut memiliki salah satu kesepakatan yaitu bidang jasa konstruksi. Liberalisasi jasa konstruksi ini menjadi ancaman sekaligus peluang untuk perluasan pangsa pasar jasa konstruksi di luar negeri.

Perencanaan kawasan/bangunan LPPPTK Bidang KPTK harus mengacu pada pendekatan ASEAN khususnya bidang jasa konstruksi yang memperhatikan kualitas pelayanan infrastruktur untuk mempertahankan pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang diharapkan. Dalam perencanaan bangunan LPPPTK KPTK mengutamakan mutu konstruksi sesuai standar teknis yang sesuai pengawasan dan konsistensi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (SMK3 konstruksi) serta Sistem Manajemen Mutu Konstruksi (SMM Konstruksi) yang berjalan secara konsisten; sumberdaya manusia (SDM) jasa konstruksi yang digunakan telah bersertifikat (sesuai ketentuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dan tenaga terampil bidang konstruksi; perlunya berbagai inovasi pola pembiayaan investasi infrastruktur, perlunya mempertajam kebijakan dukungan pemerintah dalam kerangka Public Private Partnership (PPP) agar kebijakan yang ada dapat berjalan efektif.

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan suatu lembaga atau instansi. Akuntabilitas keuangan LPPPTK KPTK dicerminkan dengan pertanggungjawabannya terhadap penggunaan anggaran yang dibelanjakan untuk melaksanakan kegiatan/program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada Tahun 2016. Pagu anggaran LPPPTK Bidang KPTK dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 setelah revisi keenam yaitu sebesar Rp 103.129.484.000. Komposisi anggaran tersebut dibagi berdasarkan unit kerja dan jenis belanja. Berdasarkan unit kerja, anggaran didistribusikan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: Sub-bagian umum, seksi program dan informasi, serta seksi fasilitasi

peningkatan kompetensi. Sedangkan berdasarkan jenis belanja, anggaran LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2016 dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu belanja barang, belanja pegawai, dan belanja modal. Uraian penggunaan dan realisasi anggaran LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2016 dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

1. Komposisi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja

Komposisi anggaran LPPPTK Bidang KPTK berdasarkan unit kerja dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sub- bagian umum, seksi program dan informasi, dan seksi peningkatan kompetensi. Jika diurutkan dari besaran alokasi anggaran, dari yang paling besar sampai yang terkecil mendapatkan dana adalah seksi peningkatan kompetensi, seksi program dan informasi, dan sub-bagian umum. Secara rinci, komposisi anggaran berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Komposisi anggaran berdasarkan unit kerja

UNIT KERJA	Alokasi (Rp)		Persentase (%)	
	Pagu Total	Pagu diluar Blokir	Pagu Total	Pagu diluar Blokir
Sub Bagian Umum	40,879,932,000	39,887,506,000	39.64	48.14
Program dan Informasi	5,082,860,400	2,275,252,400	4.93	2.75
Peningkatan Kompetensi	57,166,692,000	40,686,532,000	55.43	49.11
JUMLAH	103,129,484,400	82,849,290,400	100.00	100.00

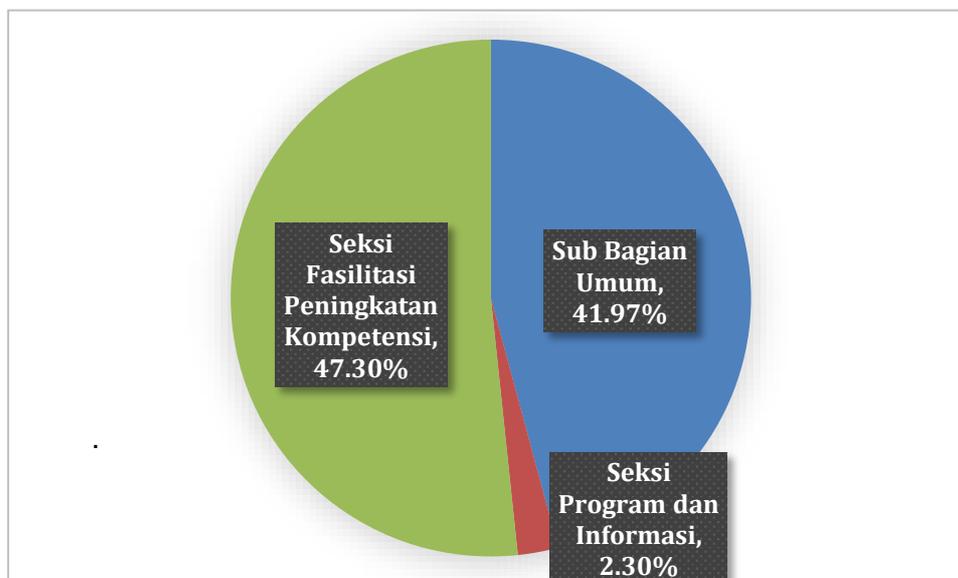
Berdasarkan pada Tabel 3.11, menggambarkan bahwa jumlah alokasi dana yang terbesar adalah seksi fasilitasi peningkatan kompetensi yaitu pada pagu total sebesar 55.43% (dari total anggaran Rp 103.129.484.000, mendapat alokasi dana sebesar Rp 57.166.692.000). Sedangkan jika dilihat pagu diluar blokir, seksi fasningkom mendapat pagu sebesar Rp 40.686.532.000 dari total Rp 82.849.290.400 atau sebesar 49.11%. Hal ini disebabkan karena seksi peningkatan kompetensi melaksanakan kegiatan atau jumlah sasaran yang banyak untuk pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Beberapa output kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi peningkatan kompetensi antara lain: (1) Guru Dikdas Mapel Tematik yang ditingkatkan kompetensinya; (2) Guru Produktif dan adaptif yang

ditingkatkan kompetensinya menurut bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi.

Sementara itu, jumlah alokasi dana terkecil adalah seksi program dan informasi yaitu secara total, hanya mendapat 4.93% (sebesar Rp 5.082.860.400 dari total Rp 103.129.484.400), dan diluar blokir sebesar 2.75% (dari total Rp 82.849.290.400 mendapat Rp 2.275.252.400). Komponen kegiatan seksi program dan informasi ini terdiri atas pelatihan kepala sekolah pembelajar, pelatihan pengawas sekolah pembelajar, serta model pemberdayaan sekolah dan pengembangan inovasi pembelajaran. Jumlah sasaran dari sub ouput kegiatan relative kecil jika dibandingkan dengan kegiatan seksi fasilitasi peningkatan kompetensi.

Sub bagian umum mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 40.879.932.000 dari total pagu Rp 103.129.484.400 (atau sebesar 39.64%. Sedangkan jika ditinjau dari pagu diluar blokir, sub bagian umum memperoleh anggaran Rp 39.887.506.000 dari total pagu Rp 82.849.290.400 (atau sebesar 48.14%). Jumlah alokasi anggaran terbesar di sub bagian umum adalah output Gedung/bangunan. Pagu total belanja Gedung/bangunan sebelum blokir sebesar Rp 31.243.836.000 dan setelah blokir Rp 29.354.093.000. Belanja Gedung ini dari total anggaran sub bagian umum yaitu mempunyai porsi sebesar 76.43%, sedangkan belanja lain hanya sebesar 23.57%. Hal serupa pagu diluar blokir, porsi anggaran belanja gedung/bangunan sebesar 73,59%, sedangkan belanja lain hanya sebesar 26,41%.

Belanja modal gedung/bangunan ini terdiri atas: (1) pembangunan gedung laboratorium TIK, (2) pembuatan gardu induk listrik PLN, (3) pembuatan sumur, pembangunan Menara, dan tower air, (4) renovasi wisma, (5) renovasi gedung asrama, (6) renovasi ruang belajar, (7) renovasi gedung aula, dan (8) renovasi gedung kantor. Selain belanja gedung/bangunan, pada sub bagian umum terdapat output lain yaitu Dokumen Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Pelaporan Ketatausahaan; layanan perkantoran; kendaraan bermotor; Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; serta Peralatan dan Fasilitas Perkantoran. Persentase komposisi anggaran berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada Gambar 3.1.

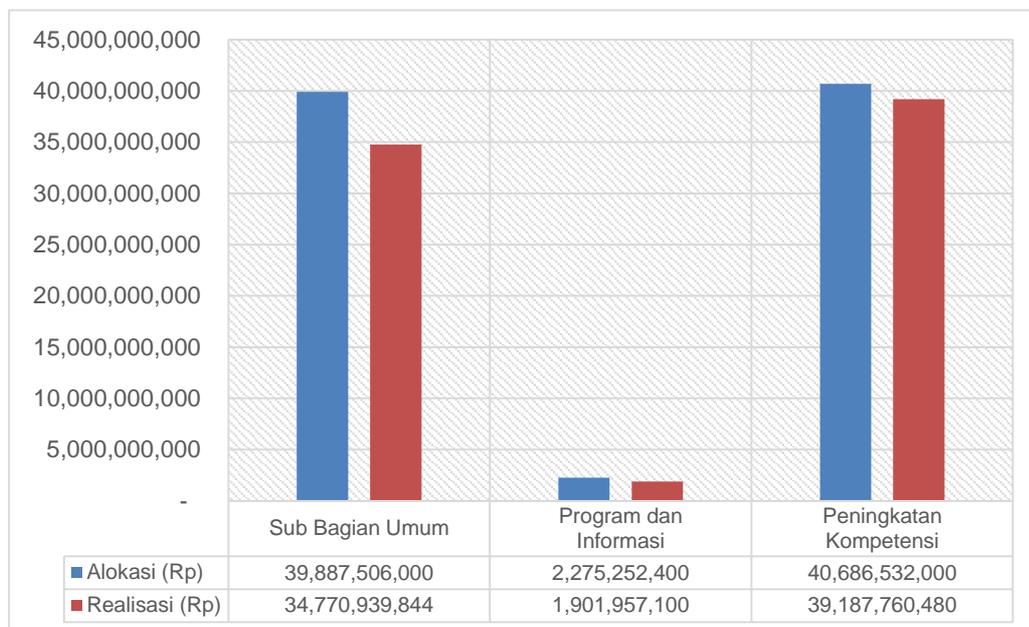


Gambar 3.1. Presentase komposisi anggaran berdasarkan unit kerja

Anggaran yang dialokasikan ke setiap unit kerja pada Tahun 2016 perlu pertanggungjawaban penggunaannya. Realisasi anggaran memiliki hubungan dengan banyaknya kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing unit kerja, serta jumlah anggaran yang dibelanjakan. Posisi kinerja keterserapan anggaran LPPPTK Bidang KPTK pada tahun anggaran 2016 di setiap Unit kerja sesuai alokasi dana masing-masing dapat dilihat pada Tabel 3.12 dan Gambar 3.2.

Tabel 3.12. Serapan anggaran di setiap Unit kerja sesuai alokasi dana masing-masing

UNIT KERJA	Alokasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Pagu Total	Pagu diluar Blokir		
Sub Bagian Umum	40,879,932,000	39,887,506,000	34,770,939,844	87.17
Program dan Informasi	5,082,860,400	2,275,252,400	1,901,957,100	83.59
Peningkatan Kompetensi	57,166,692,000	40,686,532,000	39,187,760,480	96.32
JUMLAH	103,129,484,400	82,849,290,400	75,860,657,424	91.56



Gambar 3.2. Serapan anggaran di setiap Unit kerja sesuai alokasi dana masing-masing

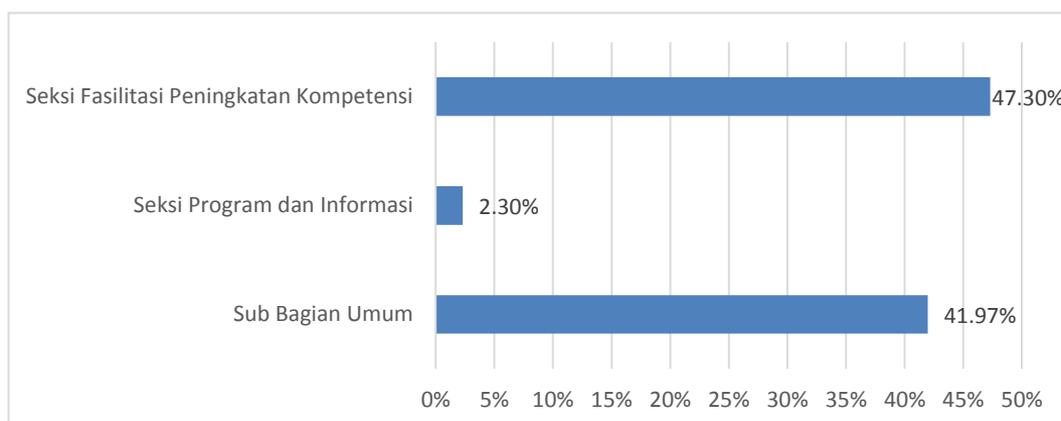
Berdasarkan Tabel 3.12 dapat menjelaskan bahwa total realisasi keuangan LPPPTK KPTK tahun 2016 (diluar blokir) adalah sebesar 91.56% (dari total anggaran Rp 82.849.290.400, terealisasi Rp 75.860.657.424). Realisasi anggaran terbesar adalah di seksi peningkatan kompetensi, dengan presentase 96.32% (alokasi Rp 40.686.532.000, realisasi Rp 39.187.760.480). Sub bagian umum, memperoleh presentase 87.17% (dari total alokasi anggaran Rp 39.887.506.000, dapat dibelanjakan sebesar Rp 34.770.939.844). Sedangkan unit kerja realisasi anggaran terkecil adalah Seksi Program dan Informasi yaitu hanya sebesar 83,59% (dari total alokasi anggaran Rp 5.082.860.400, dapat dibelanjakan sebesar Rp 2.275.252.400). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah anggaran yang besar dan kegiatan yang banyak belum tentu memiliki realisasi paling kecil. Namun realisasi anggaran ditentukan oleh besarnya dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan/program melalui dukungan sumberdaya manusia dan factor pendukung lainnya.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran di setiap unit kerja terhadap total anggaran LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2016, dapat dilihat pada tabel 3.13 dan Gambar 3.3. Jumlah total realisasi keuangan tahun 2016 sebesar 91.56%. Secara keseluruhan, realisasi anggaran terbesar disumbangkan

oleh unit kerja seksi peningkatan kompetensi, dengan presentase sebesar 47.30% (alokasi Rp 40.686.532.000, realisasi Rp 39.187.760.480). Unit kerja Sub Bagian Umum dapat merealisasikan anggaran dengan capaian sebesar 41,97% (alokasi Rp 39.887.506.000, terbelanjakan Rp 34.770.939.844), Seksi Program dan Informasi sebesar 20,24%, dan Seksi Peningkatan Kompetensi sebesar 2.30%. Dengan melihat nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa sumbangan realisasi anggaran terbesar LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2016 adalah Seksi Peningkatan Kompetensi yakni sebesar 47.30%. Ini merupakan hal yang wajar karena Seksi Peningkatan Kompetensi menerima alokasi anggaran yang terbesar dibandingkan dengan unit kerja lain, kegiatan/program yang dilakukan pun sangat banyak.

Tabel 3.13. Serapan anggaran di setiap Unit kerja terhadap total anggaran LPPPTK Bidang KPTK

UNIT KERJA	Alokasi (Rp)		Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Pagu Total	Pagu diluar Blokir		
Sub Bagian Umum	40,879,932,000	39,887,506,000	34,770,939,844	41.97
Program dan Informasi	5,082,860,400	2,275,252,400	1,901,957,100	2.30
Peningkatan Kompetensi	57,166,692,000	40,686,532,000	39,187,760,480	47.30
JUMLAH	103,129,484,400	82,849,290,400	75,860,657,424	91.56



Gambar 3.3. Serapan anggaran di setiap Unit kerja terhadap total anggaran LPPPTK Bidang KPTK

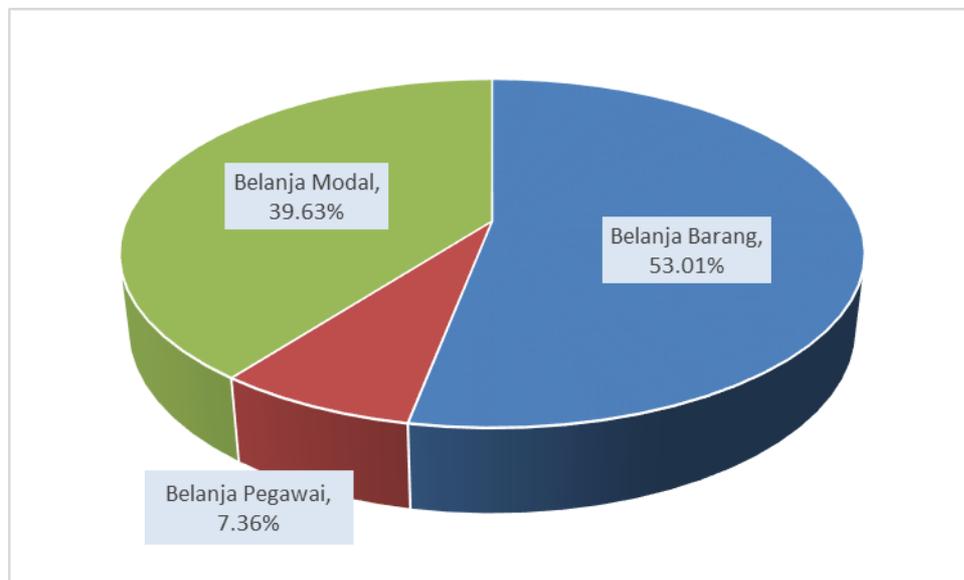
2. Komposisi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Komposisi anggaran LPPPTK Bidang KPTK berdasarkan jenis belanja dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu belanja barang, belanja pegawai dan

belanja modal. Alokasi anggaran untuk belanja barang lebih besar dibandingkan belanja pegawai dan belanja modal. Pada tahun 2016, Secara rinci, komposisi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.14 dan Gambar 3.4.

Tabel 3.14. Komposisi anggaran berdasarkan jenis belanja

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Persentase (%) dari Anggaran
Belanja Barang	43,921,319,000	53.01
Belanja Pegawai	6,098,492,000	7.36
Belanja Modal	32,829,479,000	39.63
Jumlah	82,849,290,000	100.00



Gambar 3.4. Persentase komposisi anggaran berdasarkan jenis belanja

Berdasarkan Tabel 3.14 dan Gambar 3.4 menunjukkan bahwa anggaran LPPPTK KPTK Tahun 2016 dipergunakan untuk belanja barang, belanja pegawai dan belanja modal. Proporsi anggaran untuk belanja barang lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modal dan belanja pegawai. Alokasi belanja barang untuk peningkatan kompetensi pendidik sebesar Rp 43.921.319.000 atau 53.01%. Sedangkan alokasi anggaran terkecil adalah belanja pegawai Rp 6.098.492.000 atau 7.36%.

Belanja barang dipergunakan untuk keperluan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi: (1) guru dikdas mapel tematik yang ditingkatkan kompetensinya; (2) Guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi; (3) Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran; (4) Kepala Sekolah pembelajar; (5) pengawas sekolah pembelajar; serta (6) dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi, dan pelaporan ketatausahaan. Belanja modal dipergunakan untuk membeli kendaraan bermotor; perangkat pengolah data dan komunikasi; peralatan dan fasilitas perkantoran; serta belanja untuk gedung/bangunan kantor. Sedangkan belanja pegawai dipergunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai; serta operasional dan pemeliharaan kantor.

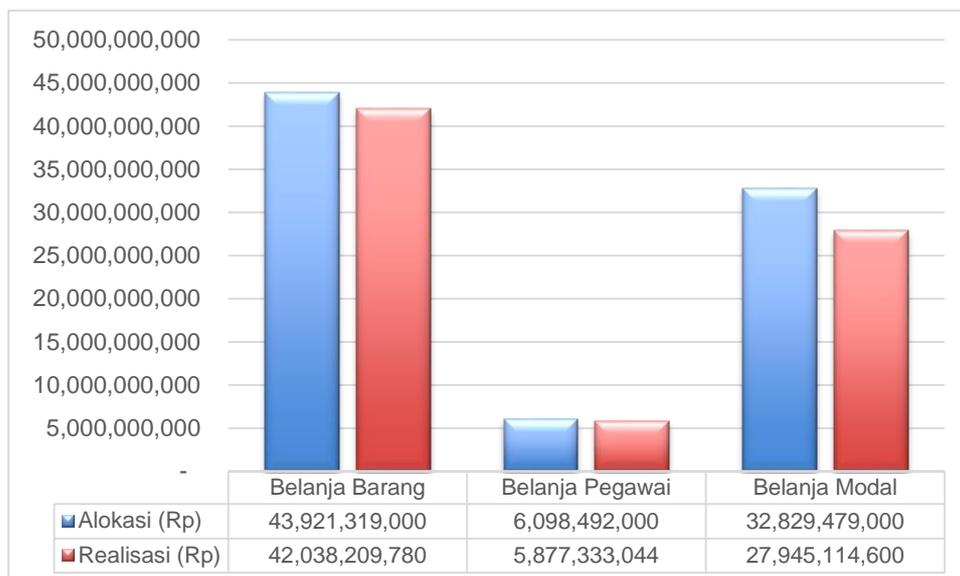
Anggaran yang dialokasikan untuk belanja barang, belanja pegawai, dan modal tahun 2016 perlu diketahui realisasi capaian penggunaannya. Posisi kinerja keterserapan anggaran LPPPTK Bidang KPTK pada tahun anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.15 dan Gambar 3.5.

Tabel 3.15. Realisasi Anggaran menurut jenis belanja terhadap alokasi dananya

Kode	Jenis Belanja	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
52	Belanja Barang	43,921,319,000	42,038,209,780	95.71
51	Belanja Pegawai	6,098,492,000	5,877,333,044	96.37
53	Belanja Modal	32,829,479,000	27,945,114,600	85.12
	Jumlah	82,849,290,000	75,860,657,424	91.56

Berdasarkan Tabel 3.15 dan Gambar 3.5 menggambarkan bahwa jumlah realisasi anggaran terbesar berdasarkan jenis belanja terhadap alokasi masing-masing adalah belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai terhadap alokasi dananya mencapai 96,37% (dari total anggaran Rp 6.098.492.000, dapat terealisasi sebesar Rp 5.877.333.044). Sedangkan belanja barang hanya mencapai 95,71% (dari total anggaran Rp 43.921.319.000, dapat terealisasi sebesar Rp 42.038.209.780).

Perbedaan selisih persentase realisasi ini disebabkan karena belanja pegawai ini merupakan pengeluaran rutin setiap bulannya sesuai dengan target sasaran fisik selama 12 bulan.

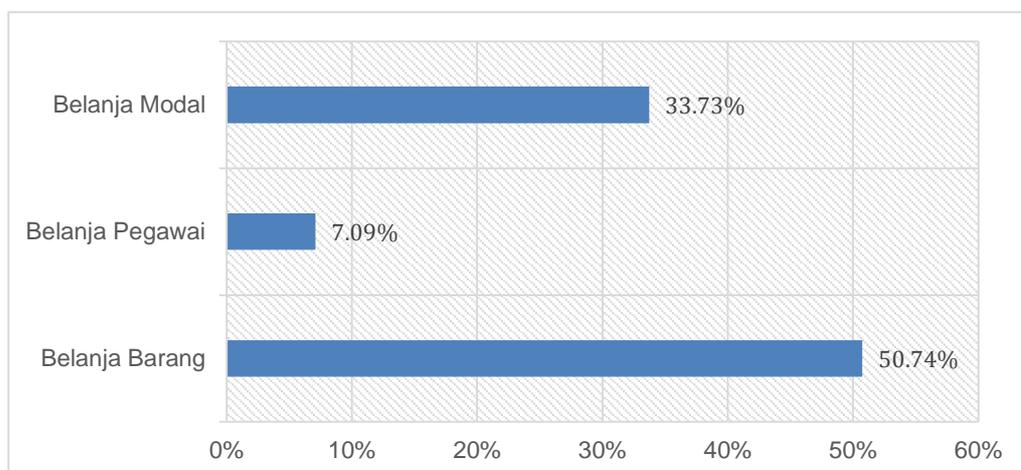


Gambar 3.5. Realisasi Anggaran menurut jenis belanja terhadap alokasi dananya

Secara keseluruhan, realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja terhadap total anggaran LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2016, dapat dilihat pada Tabel 3.14 dan Gambar 3.6. Jumlah realisasi anggaran Tahun 2016 sebesar 91.56%. Lebih jelasnya, realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja terhadap total anggaran disajikan pada Tabel 3.16 dan Gambar 3.6.

Tabel 3.16. Realisasi Anggaran menurut jenis belanja terhadap total anggaran

Kode	Jenis Belanja	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
52	Belanja Barang	43,921,319,000	42,038,209,780	50.74
51	Belanja Pegawai	6,098,492,000	5,877,333,044	7.09
53	Belanja Modal	32,829,479,000	27,945,114,600	33.73
	Jumlah	82,849,290,000	75,860,657,424	91.56



Tabel 3.6. Realisasi Anggaran menurut jenis belanja terhadap total anggaran

Belanja barang dapat terealisasi terhadap total anggaran, dengan capaian sebesar 50,74% (total pagu Rp 82.849.290.000, belanja barang terealisasi Rp 42.038.309.780), sedangkan belanja pegawai mencapai 7,09%. Kecilnya nilai presentase belanja modal ini karena dipengaruhi jumlah alokasi dana (total pagu Rp 82.849.290.000, alokasi anggaran belanja pegawai Rp 6.098.498.492.000, dapat terealisasi sebesar Rp 5.877.333.044). Jumlah pegawai (PNS/CPNS) LPPPTK KPTK pada tahun 2016 sebanyak 32 orang.

BAB IV. PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan LPPPTK Bidang KPTK kepada semua elemen masyarakat yang menjadi *stakeholders* dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan selama tahun anggaran 2016.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa LPPPTK Bidang KPTK telah merealisasikan program dan kegiatan tahun anggaran 2016 untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2014-2019 melalui lima sub indikator kinerja kegiatan. Hal ini didukung fakta bahwa LPPPTK Bidang KPTK telah menjalankan program dan kegiatan untuk merealisasikan sasaran strategisnya. Secara fisik, total realisasi capaian output kegiatan LPPPTK KPTK Tahun 2016 yaitu sebesar 91.5%. Hasil pengukuran capaian output tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang KPTK secara fisik terealisasi sebesar 99,15%; dari sasaran 3.072 pendidik, terealisasi sebanyak 3.046 pendidik.
- Model pemberdayaan sekolah dan pengembangan inovasi pembelajaran, terealisasi 100%, yaitu 1 model pembelajaran.
- Guru dikdas mapel tematik yang ditingkatkan kompetensi, terealisasi sebesar 98,52% (sasaran 14.886 orang, terealisasi 14.665 orang).
- Kepala sekolah pembelajar yang ditingkatkan kompetensinya, secara fisik terealisasi sebesar 51,33%; dari sebanyak 150 sasaran kepala sekolah, terdapat 77 orang yang ditingkatkan kompetensinya.
- Pengawas sekolah pembelajar yang ditingkatkan kompetensinya, secara fisik terealisasi 60%; dari sasaran 20 orang pengawas hanya 12 orang yang diberi pelatihan peningkatan kompetensi.
- Dukungan manajemen yang meliputi dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi, dan pelaporan ketatausahaan; layanan perkantoran, kendaraan bermotor; perangkat alat pengolah data dan komunikasi; peralatan dan fasilitas perkantoran; masing-masing terealisasi 100%; namun gedung/bangunan hanya teralisasi 97.5%.

Sementara itu, realisasi anggaran dibagi menjadi dua macam yaitu berdasarkan alokasi setiap unit kerja dan jenis belanja. Secara keseluruhan, realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja terhadap total anggaran LPPPTK Bidang KPTK Tahun 2016, realisasi anggaran sebesar 91.56%.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun anggaran 2016 merupakan landasan kuat bagi LPPPTK Bidang KPTK untuk melanjutkan pelaksanaan program-program yang akan dicanangkan pada tahun berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal penting lainnya, LPPPTK Bidang KPTK harus menetapkan langkah strategis, seperti: program yang berkesinambungan, perubahan dan penyesuaian, dan pembaharuan dalam reformasi pendidikan untuk menjawab tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era persaingan global.